



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

RANCANGAN AKHIR RENJA KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN RENCANA 2025



DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Jl. Jendral A. Yani

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Permendagri No. 86 Tahun 2017 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah, memastikan bahwa proses penyusunan Renja SKPD terdiri dari tiga tahapan utama yaitu tahap persiapan penyusunan, tahap Penyusunan rancangan, dan tahap penetapan renja SKPD. Penyusunan Renja SKPD merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Renja SKPD yang definitif.

Renja SKPD Dinas Kelautan dan Perikanan Kutai Kartanegara merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mewajibkan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) SKPD sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Penyusunan Renja Dinas Kelautan dan Perikanan Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2025 **proses Teknokratik, Politik, Partisipatif dan Top Down – Bottom Up** dan secara Substansi **bersifat Holistik, Integratif, Tematik, dan Spasial** serta mengacu pada pendekatan “ **Money Folllow Program**” berbasis tugas dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan serta visi dan Misi Rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara 2021-2026.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 adalah :

1. Landasan Idieologi : Pancasila;
2. Landasan Konstitusional : UUD 1945;
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

6. Undang-undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional;
14. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, yang diperkuat dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2020.
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem informasi Pemerintahan Daerah;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan

- Keuangan Daerah. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur No. 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2005-2025;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
 21. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 17 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2010 Nomor 17);
 22. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 9 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2013-2033;
 23. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Tahun 2021-2026.
 24. Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2017 tentang perubahan peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.
 25. Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Pada Dinas Kelautan dan Perikanan,
 26. Peraturan Bupati Bupati Kutai Kartanegara Nomor 14 tanggal 5 Juli 2024 Tentang Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA-PD) Tahun 2025.

1.3 Maksud dan tujuan

1.3.1 Maksud

Penyusunan RENJA Dinas Kelautan dan Perikanan Kutai Kartanegara Tahun Rencana 2025 dimaksudkan sebagai panduan dalam pelaksanaan program/kegiatan yang akan dituangkan dalam dokumen Rencana Kerja Anggaran (RKA) Dinas Kelautan dan Perikanan Kutai Kartanegara Tahun Rencana 2025.

1.3.2 Tujuan

Sedangkan tujuan disusunnya RENJA Dinas Kelautan dan Perikanan Kutai Kartanegara Tahun Rencana 2025 ini adalah

untuk menjadi acuan dalam penyusunan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Rencana 2025.

1.4 Sistematika Penulisan

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah maka sistematika penyusunan RENJA Dinas Kelautan dan Perikanan Kutai Kartanegara Tahun Rencana 2025 meliputi:

- BAB I. PENDAHULUAN,
berisi tentang : Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan serta Sistematika Penulisan.
- BAB II. HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU,
berisi tentang : Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD, Analisis Kinerja Pelayanan OPD, Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD, Review Terhadap Rancangan Awal RKPD, serta Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.
- BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH,
berisi tentang : Telaahan terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan dan sasaran OPD
- BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH,
berisi tentang : Program dan Kegiatan.
- BAB V. PENUTUP.

BAB II
HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KELAUTAN DAN PERIKANAN
TAHUN 2023

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Kelautan dan Perikanan Kutai Kartanegara Tahun 2023 dan Capaian Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kutai Kartanegara 2021-2026.

Pelaksanaan evaluasi Renja Kelautan dan Perikanan Tahun 2023 mengacu pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran. **Renja kelautan dan perikanan Tahun 2023 memuat 5 Program, 22 Kegiatan dan 71 Sub Kegiatan** dengan jumlah **pagu Rp. 500.299.743.472,-**. Hasil pelaksanaan program dan kegiatan dalam renja kelautan dan perikanan 2023 adalah sebagai berikut :

1. Realisasi Keuangan sebesar Rp. 470,654,646,888,- atau 94,07%
SILPA sebesar Rp. 29.645.096.584,-
2. Realisasi Fisik Kegiatan rata-rata mencapai 97%.

Capaian tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan tahun anggaran 2023 cukup baik. Bahwa ketidak cermatan dalam pengalokasian anggaran pada rekening belanja menyebabkan SILPA yang cukup besar, harga SHS pada komponen terlalu besar diatas harga perkiraan, seperti yang terjadi pada rekening Belanja Persediaan Yang Dijual/ Diserahkan Kepada masyarakat ; Sisa Lelang dan Silpa beberapa Sub Kegiatan dengan nilai kurang lebih Rp. 23.244.267.150,- (dua puluh tiga miliar dua ratus empat puluh empat juta dua ratus enam puluh tujuh juta seratus lima puluh rupiah).

Sisa lelang dari beberapa paket kegiatan juga memberi kontribusi yang besar dari jumlah SILPA pada Dinas Kelautan dan Perikanan seperti paket pada sub kegiatan Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap dan sub kegiatan Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah/Kabupaten/Kota. Selain itu, pada beberapa sub kegiatan juga terdapat sisa anggaran yang tidak mampu direalisasikan 100 %.

Sumber pendanaan program - kegiatan TA.2023 adalah sebagai berikut

- ✓ APBD Kabupaten Kutai Kartanegara,

✓ DAK.

Bahwa hingga tahun 2023 telah difasilitasi nelayan dan pembudidaya ikan aktif sebanyak kurang lebih 21,200 orang dengan anggaran dari tahun 2022 – 2023 sebesar Rp. 478,142,510,130 bahwa pencapaian tersebut dihitungkan dari beberapa sub kegiatan yang khusus memfasilitasi nelayan dan pembudidaya aktif diantaranya :

- ✓ Penjaminan ketersediaan sarana usaha perikanan tangkap sebesar : 7.865 nelayan dengan anggaran sebesar Rp. 132,240,862,800;
- ✓ Penjaminan ketersediaan sarana usaha pembudidayaan ikan yang dapat diusahakan dalam satu wilayah kab/ kota sebesar : 11,440 pembudidaya dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 279,475,309,360
- ✓ Pengembangan kapasitas nelayan kecil : 2,240 nelayan miskin dengan pemberian sarana penangkapan ikan lengkap menyerap anggaran sebesar Rp. 64,426,337,970
- ✓ Pengawasan usaha perikanan tangkap sebesar : 400 orang nelayan pelaku ilegal fishing, dengan bentuk kegiatan penggantian alat tangkap ramah lingkungan sistem barter dan sosialisasi dengan anggaran sebesar Rp. 2,000,000,000

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja SKPD dan pencapaian Renstra SKPD Dinas Kelautan dan Perikanan Kutai Kartanegara sampai dengan tahun 2023 dapat dilihat dalam Tabel TC.29 :

Tabel TC.29. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Kelautan dan Perikanan Dan Pencapaian Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kutai Kartanegara S/D Tahun 2024.

Dinas Kelautan dan Perikanan.

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja (Outcomes) Program/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Akhir Periode Renstra SKPD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan (2024)	
					Target Renja SKPD Tahun 2023	Realisasi Renja SKPD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	NON URUSAN (GENERIK)									
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai Sakip Perangkat Daerah	86 Angka/ Nilai	84 Angka/ Nilai	85.5 Angka/ Nilai	73.5 Angka/ Nilai	86.02	85.7 Angka/ Nilai	85.7 Angka/Nilai	99.65
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Rencana, Anggaran dan Evaluasi Kinerja.	25 Dokumen	11 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	100.00	3 Dokumen	17 Dokumen	68.00

			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100.00	3 Dokumen	7 Dokumen	140.00
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD.	5 Dokumen	1 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0.00	0 Dokumen	1 Dokumen	20.00
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD.	5 Dokumen	1 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0.00	0 Dokumen	1 Dokumen	20.00

			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.	5 Lap oran	1 Lap oran	0 Lap oran	0 Lap oran	0.00	5 Lap oran	6 Laporan	120.00
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.	5 Lap oran	1 Lap oran	1 Lap oran	1 Lap oran	100.00	1 Lap oran	3 Laporan	60.00
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Adminsitration Keuangan Perangkat Daerah.	110 Dok ume n Lap oran	23 Dok ume n Lap oran	21 Dok ume n Lap oran	21 Dok ume n Lap oran	100.00	21 Dok ume n Lap oran	65 Dokumen Laporan	59.09

			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	600 Orang	120 Orang	120 Orang	99 Orang	82.50	120 Orang	339 Orang	56.50
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD.	15 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	100.00	3 Laporan	9 Laporan	60.00
			Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	5 Dokumen	1 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0.00	0 Dokumen	1 Dokumen	20.00
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwul	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/	90 Laporan	18 Laporan	18 Laporan	18 Laporan	100.00	18 Laporan	54 Laporan	60.00

			anan/Semestera n	Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triw ulanan/Seme steran SKPD.									
			Penyusunan Pelaporan dan analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	5 Dok ume n Lap oran	1 Dok ume n Lap oran	0 Dok ume n Lap oran	0 Dok ume n Lap oran	0.00	1 Dok ume n Lap oran	2 Dokumen Laporan	40.00	
			Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	30 Dok ume n	6 Dok ume n	1 Dok ume n	1 Dok ume n	100.00	2 Dok ume n	9 Dokumen	30.00	
			Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	5 Dok ume n	1 Dok ume n	1 Dok ume n	1 Dok ume n	100.00	1 Dok ume n	3 Dokumen	60.00	

			Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah Pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD.	5 Laporan	1 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	0.00	1 Laporan	2 Laporan	40.00
			Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	5 Laporan	1 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	0.00	0 Laporan	1 Laporan	20.00
			Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	15 Laporan	3 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	0.00	0 Laporan	3 Laporan	20.00
			Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100.00	1 Dokumen	3 Dokumen	60.00

				Daerah.									
				Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	5 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100.00	1 Laporan	3 Laporan	60.00
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian.	10 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100.00	3 Dokumen	7 Dokumen	70.00
				Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	5 Dokumen	1 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0.00	1 Dokumen	2 Dokumen	40.00
				Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian.	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100.00	0 Dokumen	2 Dokumen	40.00

			Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	5 Dokumen	1 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0.00	1 Dokumen	2 Dokumen	40.00
			Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	50 Orang	10 Orang	10 Orang	10 Orang	100.00	50 Orang	70 Orang	140.00
			Administrasi Umum Perangkat Daerah.	Jumlah ASN Kelautan dan Perikanan Yang Mendapatkan Layanan	550 ASN	110 ASN	110 ASN	110 ASN	100.00	110 ASN	330 ASN	60.00
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan.	5 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100.00	1 Paket	3 Paket	60.00

			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100.00	1 Paket	3 Paket	60.00
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan.	5 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100.00	1 Paket	3 Paket	60.00
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100.00	1 Paket	3 Paket	60.00
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan.	5 Dokumen	1 Dokumen	218 eksemplar	2184 eksemplar	100.00	1 Dokumen	3 Dokumen	60.00
			Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Kunjungan Tamu	5 Laporan	- Laporan	1 Laporan	1 Laporan	0.00	1 Laporan	3 Laporan	60.00

			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	150 Laporan	30 Laporan	30 Laporan	30 Laporan	100.00	50 Laporan	110 Laporan	73.33
			Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100.00	1 Dokumen	3 Dokumen	60.00
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Daerah Diadakan	4 Unit	0 Unit	4 Unit	4 Unit	100	2 Unit	6 Unit	150
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan.	4 Unit	0 Unit	7 Unit	7 Unit	100.00	2 Unit	9 Unit	225.00
			Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Jabatan yang	0 Unit	0 Unit	6 Unit	6 Unit	100.00	0 Unit	6 Unit	100.00

			Dinas Jabatan	Disediakan								
			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0 Unit	0 Unit	6 Unit	6 Unit	100.00	0 Unit	6 Unit	100.00
			Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel Yang Disediakan	0 Unit	0 Unit	2 Unit	2 Unit	100.00	0 Unit	2 Unit	100.00
			Pengadaan Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	0 Unit	2 Unit	2 Unit	100.00	1 Unit	3 Unit	100.00
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	0 Unit	2 Unit	2 Unit	100.00	Unit	2 Unit	100.00

			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.	15 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	100.00	3 Laporan	9 Laporan	60.00
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan.	5 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100.00	1 Laporan	3 Laporan	60.00
			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100.00	1 Laporan	3 Laporan	60.00
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	5 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100.00	1 Laporan	3 Laporan	60.00

				yang Disediakan									
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan.	90 Pers en	90 Pers en	90 Pers en	90 Pers en	100.00	90 Pers en	90 Persen		100.00
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	115 Unit	23 Unit	23 Unit	23 Unit	100.00	23 Unit	69 Unit		60.00
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak, dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan	95 Unit	19 Unit	19 Unit	19 Unit	100.00	19 Unit	57 Unit		60.00

			atau Lapangan.	Pajak dan Perizinannya								
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	2 Unit	3 Unit	3 Unit	100.00	2 Unit	7 Unit	70.00
			Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Di rehabilitasi	10 Unit	2 Unit	5 Unit	5 Unit	100.00	3 Unit	10 Unit	100.00
			Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Di rehabilitasi.	5 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	100.00	1 Unit	3 Unit	60.00
			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Produksi Perikanan Tangkap	1E+ 05 Ton	800 00 Ton	865 20 Ton	9839 7 Ton	113.73	951 72 Ton	273 569 Ton	237.56

			Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Nelayan Terfasilitasi Sarana Penangkapan Ikan.	106 Nelayan 94	103 Nelayan 8	187 Nelayan 0	5285 Nelayan	282.62	200 Nelayan 0	832 Nelayan 3	77.83
			Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia.	35 Dokumen Data dan Informasi	7 Dokumen Data dan Informasi	2 Dokumen Data dan Informasi	2 Dokumen Data dan Informasi	100.00	2 Dokumen Data dan Informasi	11 Dokumen Data dan Informasi	31.43
			Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia.	15 Unit	2 Unit	8 Unit	8 Unit	100.00	6 Unit	16 Unit	106.67

			Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia	125 Unit 94	121 Unit 8	222 Unit 0	8130 Unit	366.22	230 Unit 0	116 Unit 48	92.49
			Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia								
			Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kot a.	Jumlah KUB Naik Kelas	40 KUB	1 KUB	8 KUB	3 KUB	37.50	20 KUB	24 KUB	60.00
				Jumlah Nelayan Miskin dan Rentan Miskin Terfasilitasi Sarana Penangkapan Ikan	272 Ora 0 ng	0 Ora ng	500 Ora ng	1730 Ora ng	346.00	250 Ora 0 ng	423 Orang 0	155.51
			Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya	272 Ora 0 ng	0 Ora ng	768 Ora ng	1746 Ora ng	227.34	150 Ora 0 ng	324 Orang 6	119.34

			Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya.	436 KUB	102 KUB	100 KUB	100 KUB	100.00	100 KUB	302 KUB	69.27
			Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Jumlah Unit Usaha yang Difasilitasi Penyaluran Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	400 Unit Usaha	50 Unit Usaha	100 Unit Usaha	100 Unit Usaha	0.00	350 Unit Usaha	500 Unit Usaha	125.00
			Pengelolaan dan Penyelenggara n Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah TPI Beroperasi	4 Unit	0 Unit	1 Unit	1 Unit	100.00	2 Unit	3 Unit	75.00
				Jumlah SOP Pengelolaan dan Penyelenggara	1 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	0.00	1 Dokumen	2 Dokumen	200.00

				an Tempat Pelelangan Ikan (TPI)										
				Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	3 Lay ana n	0 Lay ana n	3 Lay ana n	3 Lay ana n	100.00	3 Lay ana n	6 Nelayan	200.00	
				Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kot a	Jumlah Tanda Daftar Kapal Perikanan diterbitkan	715 TDK 0 P	146 TDK P	150 TDK 0 P	1000 TDK P	66.67	500 TDK 0 P	614 TDKP 6	85.96	

			Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran Sampai Dengan 10 GT	Jumlah Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Perizinan Berusaha Perikanan Tangkap yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/K ota.	1 Dok ume n	0 Dok ume n	1 Dok ume n	1 Dok ume n	0.00	1 Dok ume n	2 Dokumen	200.00
			Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran Sampai Dengan 10 GT	Jumlah Rekomendasi Tanda Daftar Kapal Perikanan	715 Dat a Rek ome nda si	146 Dat a Rek ome nda si	150 Dat a Rek ome nda si	1500 Dat a Rek ome nda si	100.00	500 Dat a Rek ome nda si	664 Data 6 Rekomendasi	92.95
			Pendaftaran Kapal Perikanan Berukuran Sampai Dengan 10 GT yang Beroperasi di Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya	Jumlah Kapal Perikanan Berukuran sampai 10 GT Terdaftar	650 Kap al Terd afta r	0 Kap al Terd afta r	150 Kap al Terd afta r	1500 Kap al Terd afta r	0.00	500 Kap al Terd afta r	650 Kapal 0 Terdaftar	100.00

			yang dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kot a											
			Penetapan Persyaratan dan Prosedur Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran Sampai Dengan 10 GT	Jumlah Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Buku Kapal Perikanan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/K ota.	1 Dok ume n	0 Dok ume n	1 Dok ume n	1 Dok ume n	0.00	0 Dok ume n	1 Dokumen	100.00		
			Pelayanan Penerbitan Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran Sampai Dengan 10 GT	328,083	650 Kap al Terd afta r	0 Kap al Terd afta r	150 Kap al Terd afta r	1500 Kap al Terd afta r	0.00	500 Kap al Terd afta r	650 Kapal 0 Terdaftar	100.00		
			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Produksi Perikanan Budidaya	2E+ 05 Ton	1E+ 05 Ton	165 751 Ton	1911 23 Ton	115.31	185 608 Ton	513 691 Ton	220.63		

			Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah POKDAKAN Bermitra	100	POK DAK AN	8	POK DAK AN	20	POK DAK AN	20	POK DAK AN	100.00	50	POK DAK AN	78	POKDAKAN	78.00
				Jumlah POKDAKAN Naik Kelas	25	POK DAK AN	10	POK DAK AN	5	POK DAK AN	3	POK DAK AN	60.00	20	POK DAK AN	33	POKDAKAN	132.00
			Pengembang an Kapasitas Pembudidaya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembang an Kapasitas.	75	Kelo mpo k	10	Kelo mpo k	15	Kelo mpo k	18	Kelo mpo k	120.00	30	Kelo mpo k	58	Kelompok	77.33
			Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembang an Kelembagaan.	348	Kelo mpo k	0	Kelo mpo k	100	Kelo mpo k	100	Kelo mpo k	100.00	100	Kelo mpo k	200	Kelompok	57.47
			Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan,	Jumlah Kelompok Usaha yang terfasilitasi Bantuan Pendanaan,	150	Kelo mpo k	0	Kelo mpo k	30	Kelo mpo k	30	Kelo mpo k	0.00	100	Kelo mpo k	130	Kelompok	86.67

			Kemitraan Usaha	Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usahanya										
			Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	100 Kelompok	5 Kelompok	46 Kelompok	46 Kelompok	100.00	30 Kelompok	81 Kelompok	81.00		
			Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Jumlah Tanda Daftar Pembudidaya Ikan Diterbitkan	500 Tanda Daftar	0 Tanda Daftar	100 Tanda Daftar	212 Tanda Daftar	21.20	100 Tanda Daftar	121 Tanda Daftar	24.24		

			Penetapan persyaratan dan prosedur penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudidayaan Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Jumlah Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Perizinan Berusaha Skala Mikro dan Kecil bagi Pembudidayaan Ikan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan.			0	0	0.00	0	0		
			Pelayanan penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudidayaan Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha bagi Pembudidayaan Ikan Kecil yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	500 Tanda Daftar	0 Tanda Daftar	100 Tanda Daftar	212 Tanda Daftar	21.20	100 Tanda Daftar	121 Tanda Daftar		24.24
			Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Jumlah Pembudidaya Ikan Terfasilitasi Sarana dan	860 Pembudidaya Ikan	610 Pembudidaya Ikan	1130 Pembudidaya Ikan	8848 Pembudidaya Ikan	783.01	2078 Pembudidaya Ikan	11536 Pembudidaya Ikan		133.98

				Prasarana Budidaya Ikan.										
				Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/K ota	35 Dok ume n Dat a.	7 Dok ume n Dat a.	1 Dok ume n Dat a.	1 Dok ume n Dat a.	100.00	1 Dok ume n Dat a.	9 Dokumen Data.	25.71	
				Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidaya an Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/K ota	135 Unit	0 Unit	35 Unit	35 Unit	100.00	100 Unit	135 Unit	100.00	
				Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidaya an Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/K ota	946 Unit 0	650 Unit	252 Unit 0	1340 Unit 0	531.75	250 Unit 0	165 Unit 50	174.95	

				Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan	5 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100.00	1 Dokumen	2 Dokumen	40.00
				Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat.	Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat.	0 Pembudidaya Ikan	0 Pembudidaya Ikan	0 Pembudidaya Ikan	0 Pembudidaya Ikan	0.00	0 Pembudidaya Ikan	0 Pembudidaya Ikan	
				Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan Untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	Luas Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat yang Direncanakan, dikembangkan,	500 Ha 0	0 Ha	100 Ha	100 Ha	100.00	0 Ha	100 Ha	2.00

				Dimanfaatkan dan Dilindungi.										
				PROGRAM PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	CAKUPAN WILAYAH SUMBERDAYA PERIKANAN YANG DIAWASI	20 Kecamatan	4 Kecamatan	20 Kecamatan	20 Kecamatan	100.00	20 Kecamatan	44 Kecamatan	220.00	
					PERSENTASE KASUS ILEGAL DAN DESTRUKTIF FISHING YANG DITUNTASKAN.	100 Persen	0 Persen	93 Persen	93 Persen	100.00	95 Persen	188 Persen	188.00	
				Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) yang Difasilitasi	12 POKMASWAS	2 POKMASWAS	3 POKMASWAS	3 POKMASWAS	100.00	5 POKMASWAS	10 POKMASWAS	83.33	

			Jumlah Reservat Diawasi	3 Reservat	3 Reservat	3 Reservat	3 Reservat	100.00	3 Reservat	3 Reservat	100.00
			Jumlah Nelayan Mendapatkan Alat Tangkap Ramah Lingkungan	200 Orang	0 Orang	400 Orang	200 Orang	50.00	500 Orang	700 Orang	
		Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Sumber Daya Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota.	5 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100.00	1 Dokumen	2 Dokumen	40.00

			Pengawasan usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota	Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/ko ta								
			Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota.	5 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100.00	1 Dokumen	2 Dokumen	40.00

			Pengawasan usaha pembudidayaan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota	Jumlah pelaku usaha pembudidayaan ikan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan kabupaten/kota								
			PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Jumlah Produksi Pengolahan Hasil Perikanan	276 Ton 68	216 Ton 78	239 Ton 00	6037 Ton 0	252.59	250 Ton 95	107 Ton 143	387.25
				Jumlah Ekspor Produk Kelautan dan Perikanan	186 Ton 0	150 Ton 0	160 Ton 7	1717 Ton	106.85	168 Ton 7	490 Ton 4	263.66
			Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro Dan Kecil	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Memiliki Tanda Daftar Usaha Pengolahan	50 Tan da Daft ar	2 Tan da Daft ar	10 Tan da Daft ar	10 Tan da Daft ar	100.00	10 Tan da Daft ar	22 Tanda Daftar	44.00

			Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan Skala Usaha dan Risiko.	5 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100.00	1 Dokumen	2 Dokumen	40.00
			Pelaksanaan verifikasi perizinan berusaha sesuai dengan standar usaha bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan berdasarkan skala usaha dan tingkat risiko	Jumlah rekomendasi perizinan berusaha sesuai dengan standar usaha bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan berdasarkan skala usaha dan tingkat risiko								

			Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Yang Menerapkan Standar Mutu	25 Unit Usaha	0 Unit Usaha	15 Unit Usaha	15 Unit Usaha	100.00	15 Unit Usaha	30 Unit Usaha	120.00
			Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan Atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala	25 Unit Usaha	0 Unit Usaha	15 Unit Usaha	15 Unit Usaha	100.00	15 Unit Usaha	30 Unit Usaha	120.00

				Usaha dan Risiko.									
			Penyediaan Dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah POKLAHSAR Difasilitasi Sarana Pengolahan dan Pemasaran.	105 POK LAH SAR	0 POK LAH SAR	25 POK LAH SAR	25 POK LAH SAR	100.00	50 POK LAH SAR	75 POKLAHSAR	71.43	
			Peningkatan Ketersediaan Ikan Untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota.	250 Ton	0 Ton	50 Ton	50 Ton	100.00	50 Ton	100 Ton	40.00	

Terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RENJA Dinas Kelautan dan Perikanan Kutai Kartanegara Tahun 2023 disampaikan hal-hal sebagai berikut:

Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dalam Renja Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2023 cukup baik, namun diharapkan kedepannya bagi sub kegiatan yang belum atau kurang mendapatkan alokasi anggaran (Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Non Urusan/Generik) dapat menjadi perhatian secara bersama untuk pengalokasian ataupun penambahan anggaran.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi, Dinas Kelautan dan Perikanan Kutai Kartanegara menyelenggarakan urusan pilihan yaitu urusan kelautan dan perikanan. Penyelenggaraan pembangunan kelautan dan perikanan seperti yang tertuang dalam Renja Tahun 2023, memberi dampak positif terhadap pencapaian target kinerja yang ditetapkan sebagai berikut :

1) Indeks Nilai Tukar (Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Pengolah Hasil Perikanan)

Indeks Nilai Tukar (Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Pengolah Hasil Perikanan) mencapai angka rata – rata 103 dari tiga nilai tukar yang diukur. Data ini merujuk pada hasil perhitungan Tenaga Ahli dari Universitas Mulawarman. Nilai yang dicapai ini mengindikasikan bahwa terjadi peningkatan kemampuan rumah tangga perikanan dalam memenuhi kebutuhan biaya produksi pada usaha sektor perikanan yang dijalankan. Dari hasil analisis terdapat permasalahan pada NTPi sektor budidaya khususnya udang windu dalam tambak dari total penerimaan sebesar 0,92 (NTPi<1) sedangkan NTPi dari penerimaan usaha perikanan bernilai 1,53 amngka ini memberikan penafsiran bahwa kemampuan rumah tangga petambak dalam memenuhi kebutuhan hidup masih berada pada skala subsisten, meskipun usaha tambak dapat terpenuhi dengan maksimal.

2) Nilai Produksi Perikanan.

Nilai produksi perikanan berdasarkan Data Statistik Kelautan dan Perikanan Tahun 2023 sebesar Rp.8.925.000.000.000 melebihi dari target sebesar Rp.8.310.000.000.000 memperlihatkan peningkatan yang signifikan dari tahun 2022.

Intervensi anggaran kepada para pembudidaya dalam memenuhi kebutuhan pakan, benih dan sarana berdampak positif terhadap produksi yang kemudian dapat mendongkrak nilai produksi perikanan, selain itu juga penyaluran sarana penangkapan ikan dan pengolahan ikut andil dalam mendongkrak nilai produksi sektor perikanan.

3) Produksi Perikanan Tangkap.

Data statistik perikanan tangkap 2023 memperlihatkan data yang cukup baik pada aspek produksi. Dari target yang ditetapkan, angka produksi perikanan tangkap 2023 di atas angka target, yaitu dari 86.520 Ton target menjadi 98.397 Ton Realisasi. Pencapaian ini dimungkinkan karena peran aktif Pemerintah dalam mengoptimalkan kegiatan penangkapan ikan dengan kebijakan pendistribusian BBM bersubsidi langsung ke sentra nelayan, khususnya di wilayah pesisir. Disamping hal itu, adanya program bantuan langsung tunai untuk membantu biaya operasional serta distribusi sarana penangkapan ikan yang cukup masih kepada nelayan menambah gairah nelayan untuk meningkatkan kapasitas produksi hasil tangkapannya.

4) Produksi Perikanan Budidaya.

Produksi perikanan budidaya di tahun 2023 berdasarkan perhitungan data statistik perikanan budidaya mengalami peningkatan signifikan dari target sebesar 165.751 ton meningkat sebesar 191.122,52 ton. Peran aktif pemerintah dalam menyalurkan subsidi pakan dalam bentuk BLT memberikan dampak positif terhadap peningkatan produksi budidaya, selain itu juga penyaluran bantuan sarana pada kelompok – kelompok perikanan juga memberikan dampak signifikan. Produksi budidaya non ikan juga ikut mendongkrak produksi perikanan budidaya diantaranya kerang dara dan rumput laut.

5) Persentase Kasus Ilegal Dan Destruktif Fishing Yang Dituntaskan.

Kegiatan pengawasan Sumber Daya Ikan pada tahun 2023, terdapat beberapa pelaku kegiatan penangkapan ikan dengan alat tangkap ilegal (Setrum) yang didapati melakukan penangkapan ikan dengan alat tangkap ikan setrum. Juga ditemukan penggunaan alat tangkap ikan sawaran yang masuk kedalam alat tangkap ilegal. Kinerja yang cukup baik dalam

upaya menurunkan kegiatan aktifitas illegal fishing dipengaruhi oleh upaya sistematis dan terkoordinir oleh beberapa stake holder, seperti hadirnya Dinas Kelautan dan Perikanan propinsi dengan sarana dan prasarana yang dimiliki, peran aktif aparat Desa, Kecamatan, Pol PP dan pihak kepolisian dalam kegiatan pengawasan, edukasi kepada masyarakat serta upaya penggantian alat tangkap illegal dengan alat tangkap yang ramah lingkungan.

6) Produksi Pengolahan Hasil Perikanan.

Produksi Pengolahan Hasil Perikanan merupakan salah satu pelaku usaha perikanan yang juga mengalami perbaikan dengan adanya pertumbuhan produksi. Jika dilihat dari angka capaian terhadap angka target yang ditetapkan. Pencapaian ini cukup berdampak positif pada tingkat kesejahteraan pelaku usaha, jika dibandingkan pada kegiatan penangkapan maupun pembudidayaan ikan. Produksi olahan hasil perikanan hingga saat ini belum cukup berkembang, terlihat dari jenis olahan yang masih bertahan pada olahan ikan kering, amplang, kerupuk ikan.

7) Eskpor Produk Kelautan dan Perikanan.

Kegiatan ekspor produk hasil perikanan, hingga saat ini masih terus berlangsung dengan komoditi yang masih sama yaitu Udang Beku, Kepiting Bakau, dan Ikan Betutu. Pertumbuhan ekspor di tahun 2023 mengalami peningkatan yang tidak terlalu signifikan dari target sebesar 1.607 ton terealisasi sebesar 1.717 ton. Komoditi udang windu masih belum mampu mendongkrak jumlah ekspor produk kelautan dan perikanan. Berlimpahnya produksi udang di Negara India dengan harga yang lebih murah berdampak pada secara langsung pada komoditi udang di Indonesia. Dengan harga yang turun, pelaku ekspor dalam negeri harus menurunkan harga beli dari produsen udang agar dapat bertahan. Kondisi ini diperparah dengan menurunnya permintaan komoditi udang dipasar Dunia sebagai akibat dari tidak stabilnya ekonomi Dunia akibat perang yang terjadi di negara eropa yang merupakan salah satu tujuan utama ekspor komoditi udang.

8) Jumlah Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Pengolah Hasil Perikanan Terfasilitasi Sarana dan Prasarana Perikanan.

Fasilitasi Pelaku usaha perikanan yang dalam hal ini Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Pengolah Hasil Perikanan merupakan salah satu target yang ditetapkan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan dalam upaya peningkatan kapasitas produksi pelaku usaha perikanan. Pada tahun 2023, terdapat sejumlah 14.133 pelaku usaha perikanan mendapatkan sarana produksi dari Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dari beberapa sumber pendanaan. Upaya ini berdampak positif bagi kegiatan penangkapan ikan dan Pengolahan Hasil Perikanan, namun kurang optimal untuk menumbuhkan gairah bagi pelaku usaha budidaya karena harga jual komoditi ikan hasil budidaya cenderung stagna bahkan mengalami penurunan yang tinggi pada komoditi tertentu seperti komoditi udang.

Analisis pencapaian kinerja pelayanan SKPD dapat dilihat pada Tabel TC.30 berikut ini :

Tabel TC.30. Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kutai Kartanegara.

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK (PP-6/'08)	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian	Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025		Tahun 2023	Tahun 2024	
	Nilai Tukar Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Pengolah Hasil Perikanan (Nilai)			101,5	102	103	104	103	103	104	terjadi peningkatan kemampuan rumah tangga perikanan dalam memenuhi kebutuhan biaya produksi pada usaha sektor perikanan yang dijalankan

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK (PP-6/'08)	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian	Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025		Tahun 2023	Tahun 2024	
	Nilai Produksi Perikanan (Milyar Rp.)			7.386	8.310	9.390	10.658	8.925	9.390	10.658	Antisipasi kenaikan harga BBM dan Pakan dengan pemberian subsidi berupa BLT berdampak mampu menaga nilai produksi
	Produksi Perikanan Tangkap (Ton)			82.400	86.520	95.172	104.689	82.905.7	86.520	95.172	peran aktif Pemerintah dalam mengoptimalkan kegiatan penangkapan ikan dengan kebijakan pendistribusian BBM bersubsidi langsung ke sentra nelayan, khususnya di wilayah pesisir
	Produksi Perikanan Budidaya (Ton)			150.656	165.721	185.608	207.881	191.122,52	185.608	207.881	Produksi budidaya non ikan juga ikut mendongkrak

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK (PP-6/'08)	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian	Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025		Tahun 2023	Tahun 2024	
											produksi perikanan budidaya diantaranya kerrang dara dan rumput laut
	Persentase Kasus Ilegal Dan Destruktif Fishing Yang Dituntaskan (%)			92	93	95	98	93	95	98	upaya sistematis dan terkoordinir oleh beberapa stake holder
	Produksi Pengolahan Hasil Perikanan (Ton)			22.672	23.900	25.095	26.350	60.370	25.095	26.350	Peningkatan produksi dari pembaharuan data pengolah terutama dari sektor pengeringan ikan
	Eskpor Produk Kelautan dan Perikanan (Ton)			1.530	1.607	1.687	1.771	1.717	1.687	1.771	Berlimpahnya produksi udang di Negara India dengan harga yang lebih murah berdampak pada

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK (PP-6/'08)	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian	Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025		Tahun 2023	Tahun 2024	
											secara langsung pada komoditi udang di Indonesia
	Jumlah Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Pengolah Hasil Perikanan Terfasilitasi Sarana dan Prasarana Perikanan.			5.000	5.000	5.000	5.000	14.133	7.578	5.000	Dari target 25.000 nelayan sisa yang belum tersalurkan sekitar 5,000 orang dan akan mampu dipenuhi pada Tahun 2024

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Kutai Kartanegara.

1. Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Kutai Kartanegara.
Berdasarkan UU No.23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Kelautan dan Perikanan Kabupaten hanya memiliki 5 urusan kewenangan, yaitu Pemberdayaan Nelayan Kecil, Pemberdayaan Pembudidaya Kecil, Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan (TPI), Pengelolaan Kawasan Buidaya Ikan dan Izin Budidaya Ikan. Terbitnya UU tersebut, disikapi dengan dibentuknya Organisasi Perangkat Daerah yang baru dengan Struktur Organisasi dan Tata Kelola (SOTK) yang disesuaikan dengan kewenangan yang dimiliki. Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi untuk memberikan pelayanan, maka dilakukan

penyusunan Renstra Kelautan dan Perikanan yang mengacu pada kewenangan tersebut di atas sebagai pedoman pelaksanaan pelayanan, yang didalamnya memuat program kegiatan serta sasaran terukur yang akan dicapai.

Dalam perjalanannya, pelaksanaan UU No.23 Tahun 2014, khususnya terhadap kewenangan yang dimiliki oleh Kabupaten Kota dalam pengelolaan Kelautan dan Perikanan mengalami perubahan dengan terbitnya Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, yang diperkuat dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2020. Keputusan Menteri Dalam Negeri ini memerlukan penyesuaian dalam internal Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kukar, termasuk didalamnya penyesuaian terhadap Program dan Kegiatan.

2. Penetapan Ibu Kota Negara.

Penetapan Ibu Kota Negara di Wilayah Propinsi Kalimantan Timur akan berdampak besar bagi kawasan-kawasan penyangga seperti Kabupaten Kutai Kartanegara. Dampak dimaksud harus dipandang sebagai peluang, khususnya bagi pembangunan kelautan dan perikanan sehingga dapat membawa kesejahteraan bagi pelaku usaha dibidang kelautan dan perikanan.

3. Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Dalam Menyelenggarakan Tugas dan Fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Kutai Kartanegara.

Dalam rangka menyelenggarakan tugas dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Kutai Kartanegara, terdapat beberapa permasalahan maupun hambatan yang dihadapi, diantaranya :

- a. Masih rendahnya kualitas sumberdaya manusia kelautan dan perikanan terkait dengan keterampilan dan adopsi teknologi perikanan yang menyebabkan terbatasnya tingkat produktivitas usaha perikanan tangkap, budidaya dan pengolahan hasil perikanan.
- b. Masih perlunya peningkatan pemahaman, kesadaran, kepedulian dan partisipasi masyarakat kelautan dan perikanan dalam pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan yang bertanggung jawab dan berwawasan lingkungan.

- c. Penurunan potensi sumberdaya ikan (SDI) akibat kerusakan habitat (terumbu karang dan mangrove), lebih tangkap (*overfishing*), penggunaan alat tangkap terlarang (misalnya pemboman, penggunaan *mini trawl*), penggunaan bahan peledak, electrical fishing/Penyetruman dan pencemaran limbah industri serta limbah rumah tangga.
- d. Keamanan pangan produk hasil pengolahan ikan yang belum memenuhi persyaratan mutu, misalnya bebas dari bahan tambahan yang dilarang seperti formalin merupakan salah satu permasalahan dalam rangka peningkatan mutu hasil pengolahan perikanan.
- e. Terbatasnya sarana prasarana dan teknologi budidaya perikanan dan pengolahan hasil perikanan sehingga produksi yang dihasilkan belum optimal.
- f. Dukungan sarana dan prasarana khususnya perikanan tangkap yang belum mampu mengeksplorasi/mengakses WPP 713 seperti keterbatasan armada penangkapan, PPI (Pangkalan Pendaratan Ikan) dan jumlah sumberdaya manusia aparatur yang melayani operasional sarana/prasarana dan pembinaan dalam bidang usaha perikanan.
- g. Sebagian nelayan laut masih dikategorikan masyarakat kurang sejahtera yang antara lain disebabkan karena skala usaha penangkapan masih tradisional yaitu menggunakan perahu motor berkapasitas kecil dengan kemampuan *one day fishing*, dengan area penangkapan pada perairan pantai yang kondisi sumberdaya ikannya sudah over fishing.
- h. Kerusakan lingkungan, bencana alam dan dampak perubahan iklim serta meningkatnya aktivitas pemanfaatan sumberdaya di kawasan hulu dan pesisir tanpa memperhatikan kaidah-kaidah pelestarian lingkungan serta pencemaran limbah industri dan rumah tangga yang menyebabkan menurunnya daya dukung lingkungan perairan berakibat pada rendahnya produktivitas perikanan budidaya.
- i. Konflik nelayan dan tindak pidana perikanan yang secara umum disebabkan karena menurunnya sumberdaya perikanan dan kelautan, penggunaan bahan dan alat tangkap terlarang, perebutan daerah penangkapan (*fishing ground*),

pelanggaran jalur penangkapan, pengrusakan lingkungan/penangkapan ikan yang tidak ramah lingkungan, dan isu nelayan luar atau andon.

4. Visi-Misi Bupati Kutai Kartanegara.

visi dan misi Bupati Kutai Kartanegara yang tertuang dalam draft RPJMD 2021-2026 dalam hal urusan kelautan dan perikanan tertuang dalam

Misi 1 : Memantapkan Birokrasi Yang Bersih, Efektif, Efisien dan Melayani

Misi ke 2 : Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Unggul dan Berbudaya, dan

Misi ke 3 : Memperkuat Pembangunan Ekonomi Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Misi tersebut diintegrasikan dalam Renstra Kelautan dan Perikanan Kutai Kartanegara, sehingga target kinerja yang akan dicapai oleh Dinas Kelautan dan Perikanan merupakan salah satu instrument pencapaian Visi Misi Kepala daerah.

5. Tantangan dan Peluang Dalam Meningkatkan Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan.

Pembangunan kelautan dan perikanan di Kabupaten Kutai Kartanegara perlu mengelola faktor lingkungan organisasi, baik yang bersifat internal maupun eksternal, sebagai modal dasar untuk merumuskan strategi pembangunan kelautan dan perikanan.

Pada konteks pembangunan dimaksud, lingkungan strategis eksternal yang secara langsung berpengaruh terhadap kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan di Kabupaten Kutai Kartanegara yakni: *Code of Conduct for Responsible Fisheries dan International Plan of Action, Millennium Development Goals Kelautan dan Perikanan, Sustainable Development Goals Kelautan dan Perikanan, The United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC)* pada tahun 1994, serta *Western and Central Pacific Fisheries Commission (WCPFC)*. Selain itu, terdapat pula berbagai fakta Internasional dan Regional, seperti *Asia Pacific Economic Cooperation (APEC)* dan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Lingkungan strategis kelautan dan perikanan internal yang berpengaruh besar terhadap keberhasilan pembangunan

perikanan yakni (1) aspek ekonomi yang berfokus pada upaya peningkatan kontribusi sektor perikanan terhadap PDRB, (2) aspek sosial dan politik, yang berkaitan dengan konstelasi politik di tingkat nasional maupun daerah serta pembagian wewenang urusan perikanan dengan pemerintah daerah dalam koridor Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (3) kerangka kebijakan dan hukum nasional, terkait dengan ratifikasi berbagai konvensi internasional, pelaksanaan Undang Undang, Peraturan Pemerintah, Perpres, Keppres, Inpres, dan berbagai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan yang berkenaan dengan bidang kelautan dan perikanan (termasuk Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan), (4) sistem kelembagaan dan pemerintahan di pusat dan daerah, terutama menyangkut sinergi dan dukungan lintas K/L terkait serta Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi dan lintas Kabupaten/Kota, (5) perkembangan Iptek dan teknologi informasi, terutama terkait dengan penyediaan data statistik perikanan yang handal sangat diperlukan sebagai data dasar untuk mengukur tingkat eksploitasi dan status stok ikan, (6) kapasitas sumber daya manusia, terutama berkaitan dengan pendayagunaan peran strategis sumberdaya manusia perikanan sebagai penentu keberhasilan kegiatan di sentra-sentra pengolahan berbasis produk perikanan, dan (7) sistem pengawasan, terutama terkait dengan pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan untuk menjamin ketertiban pelaksanaan pemanfaatannya demi terjaganya kelestarian sumberdaya tersebut, keberlanjutan mata pencaharian masyarakat, serta pertumbuhan ekonomi yang bersumber dari pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan. Hal penting lain yang menjadi tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan adalah :

- a. Posisi strategis dan keunikan sumberdaya perikanan, dimana wilayah pesisir Kabupaten Kutai Kartanegara berada pada **kawasan Delta Mahakam** yang merupakan kawasan strategis dalam aspek lingkungan pesisir serta berhadapan dengan **Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI II)** yang berpotensi besar untuk pengembangan ekonomi kemaritiman. Sumberdaya perikanan darat di wilayah ini memiliki **spesies**

mamalia Pesut Mahakam (*Orcaella brevirostris*) yang merupakan jenis yang paling langka di dunia.

- b. globalisasi ekonomi (misal MEA dan APEC) semakin lebih membuka peluang pengembangan pasar ekspor.

Degradasi sumberdaya kelautan dan perikanan masih terjadi, terlihat dari gejala adanya over eksploitasi serta timbulnya beberapa dampak dari terjadinya pencemaran lingkungan perairan akibat aktifitas industri dan rumah tangga di hulu maupun di wilayah pesisir.

2.4 Review Terhadap Rancangan awal RKPD/Renstra SKPD

Rancangan awal RKPD/ Renstra SKPD menjadi acuan dalam penyusunan rancangan rencana kerja Perangkat Daerah. Dalam proses penyempurnaan melalui analisis dilakukan penyesuaian terhadap kebutuhan Dinas Kelautan dan Perikanan, Dikaitkan dengan visi dan misi RPJMD 2021-2026 serta urusan Kelautan dan Perikanan yang diselenggarakan Dinas Kelautan dan Perikanan. fungsi dan tugas Dinas Kelautan dan Perikanan terkait erat dengan pencapaian **misi ke 1 yaitu Memantapkan Birokrasi Yang Bersih, Efektif, Efisien dan Melayani, ke-2 yaitu Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Unggul dan Berbudaya, dan Misi ke 3 yaitu Memperkuat Pembangunan Ekonomi Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.**

Misi ke 2 yang menjadi bagian tugas dan fungsi kelautan dan perikanan adalah program ke 8 yaitu Program Kesejahteraan Sosial dimana salah satu focus program yang sejalan dengan pembangunan kelautan dan perikanan adalah **Fasilitasi Pengembangan Usaha bagi masyarakat miskin minimal 1.000 Penduduk Tahunan yang dengan sasaran program pada verifikasi Basis Data Terpadu Kemiskinan.**

Misi ke 3 yang menjadi bagian dari tugas dan fungsi Kelautan dan Perikanan terdapat dalam program 1 yaitu Program Pembangunan Pertanian berbasisi kawasan, khususnya pada point **Fasilitasi sarana dan prasarana 25.000 Nelayan & Pembudidaya Perikanan Produktif dalam upaya peningkatan produksi dan akses pemasaran.**

Secara keseluruhan, hasil telaahan terhadap rancangan awal RKPD/ Renstra SKPD dapat dilihat pada Tabel TC.31.

Tabel TC .31. Rencana Terhadap Rancangan Akhir RKPD Tahun 2025 Kabupaten Kutai Kartanegara.

Perangkat Daerah : Dinas Kelautan dan Perikanan

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						CATATAN PENTING
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi Prioritas	Indikator or Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana(Rp)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi Prioritas	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana(Rp)		
	NON URUSAN (GENERIK)				18,903,308,130	NON URUSAN (GENERIK)					19,421,843,487	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		Nilai Sakip Perangkat Daerah	Angka 85.7	18,903,308,130	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		Nilai Sakip Perangkat Daerah	Angka 85.7		19,421,843,487	
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Rencana, Anggaran dan Evaluasi Kinerja.	5	Dokumen	576,766,085	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Rencana, Anggaran dan Evaluasi Kinerja.	3	Dokumen	1,050,000,000	

							PENYEL ENGGARAA N WALIDATA PENDUKUN G STATISTIK SEKTORAL DAERAH	DKP Kutai Kart anegara, Teng garong.	Jumlah Dokumen Hasil Penyelengga raan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1	Dikum en	50,000,000	Koordinasi walidata pendukung statistik sektoral daerah
							PELAKS ANAAN PENGUMPU LAN DATA STATISTIK SEKTORAL DAERAH	DKP Kutai Kart anegara, Teng garong.	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulka n dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	1	Data	250,000,00 0	Pelaksanaan pengumpulan data sektoral daerah, Satu Data (BECIK) - Kecamatan sebagai pusat data (operasional,Hon orarium, Peralatan, pendampingan teknis)
							PELAKS ANAAN FORUM PERANGKAT DAERAH BERDASAR KAN BIDANG	DKP Kutai Kart anegara, Teng garong.	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang	1	Berita Acara	50,000,000	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah (Renstra dan Renja)

							URUSAN YANG DIAMPU DALAM RANGKA PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH		Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	DKP Kutai Kartanegara, Tenggarong.	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1	Dokumen	300,000,000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	DKP Kutai Kartanegara, Tenggarong.	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3	Dokumen	500,000,000	Penambahan Anggaran Untuk Penyusunan Renstra
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	DKP Kutai Kartanegara, Tenggarong.	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyus	1	Dokumen	35,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	DKP Kutai Kartanegara, Tenggarong.	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD.	-	Dokumen	-	Penyusunan Dokumen RKA dapat dilaksanakan tanpa Pembiayaan.

			unan Dokum en RKA- SKPD.										
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	DKP Kutai Kartanegara, Tenggaring.	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD.	1	Dokumen	35,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	DKP Kutai Kartanegara, Tenggaring.	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD.	-	Dokumen	-	Penyusunan Dokumen Perubahan RKA dapat dilaksanakan tanpa Pembiayaan.
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja	DKP Kutai Kartanegara, Tenggaring.	Jumlah Laporan Capaian Kinerja	1	Laporan	35,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan	DKP Kutai Kartanegara, Tenggaring.	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi	3	Laporan	50,000,000	

	dan Ikhtisar Kinerja SKPD	arong.	dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.				Ikhtisar Kinerja SKPD	garong.	Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.				
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	DKP Kutai Kartanegara, Tenggarong.	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat	1	Laporan	171,766,085	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	DKP Kutai Kartanegara, Tenggarong.	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.	2	Dokumen	150,000,000	Untuk Pelaksanaan Evaluasi Renstra dan Evaluasi Renja

			kat Daerah.					ng.					
	Administra si Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah Dokum en Lapora n Admins itrasi Keuang an Perang kat Daerah.	23	Doku men	15,354,893, 921	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Laporan Adminsitasi Keuangan Perangkat Daerah.	21	Doku men	14,265,195, 363	
	Penyed iaan Gaji dan Tunjangan ASN	DKP Kutai Karta negara, Tengg arong.	Jumlah Orang yang Meneri ma Gaji dan Tunjan gan ASN	120	Oran g/Bu lan	15,059,893, 921	Penyedia an Gaji dan Tunjangan ASN	DKP Kutai Karta negera, Tengg arong.	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	120	Orang /Bula n	13,990,195, 363	

	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	DKP Kutai Kartanegara, Tenggaring.	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD.	3	Laporan	20,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	DKP Kutai Kartanegara, Tenggaring.	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD.	3	Laporan	25,000,000	Laporan Keuangan Akhir tahun : Laporan catatan atas laporan keuangan (CALK); Laporan Realisasi Anggaran (LRA); Laporan Operasional (LO)
	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	DKP Kutai Kartanegara, Tenggaring.	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan	1	Dokumen	25,000,000	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	DKP Kutai Kartanegara, Tenggaring.	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	-	Dokumen	-	Dapat disediakan tanpa Pembiayaan, anggaran difokuskan pada sub kegiatan penting lainnya.

			Tindak Lanjut Pemeriksaan										
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran	DKP Kutai Kartanegara, Tenggara.	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan	18	Laporan	225,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran	DKP Kutai Kartanegara, Tenggara.	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD.	18	Laporan	225,000,000	

			/Semesteran SKPD.										
	Penyusunan Pelaporan dan analisis Prognosis Realisasi Anggaran	DKP Kutai Kartanegara, Tenggaring.	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1	Dokumen	25,000,000	Penyusunan Pelaporan dan analisis Prognosis Realisasi Anggaran	DKP Kutai Kartanegara, Tenggaring.	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1	Dokumen	25,000,000	
	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	6	Dokumen	65,000,000	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2	Dokumen	80,000,000	

	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	DKP Kutai Kartanegara, Tenggarong.	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1	Dokumen	10,000,000	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	DKP Kutai Kartanegara, Tenggarong.	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1	Dokumen	25,000,000	Penambahan anggaran untuk peningkatan kualitas laporan.
	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah Pada SKPD	DKP Kutai Kartanegara, Tenggarong.	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD.	1	Laporan	25,000,000	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah Pada SKPD	DKP Kutai Kartanegara, Tenggarong.	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD.	1	Laporan	25,000,000	
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	DKP Kutai Kartanegara, Tenggarong.	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyus	1	Laporan	10,000,000	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Pada SKPD	DKP Kutai Kartanegara, Tenggarong.	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik	1	Laporan	30,000,000	

	Pada SKPD		un Lapora n Barang Milik Daerah pada SKPD					ng.	Daerah pada SKPD				
	Penata usaha an Barang Milik Daerah Pada SKPD	DKP Kutai Karta negera, Tengg arong.	Jumlah Lapora n Penata usaha an Barang Milik Daerah pada SKPD	3	Lapo ran	20,000,000	Penata usaha an Barang Milik Daerah Pada SKPD	DKP Kutai Karta negera, Tengg arong.	Jumlah Laporan Penata usaha an Barang Milik Daerah pada SKPD	-	Lapora n	-	Dapat dilaksana kan tanpa Pembiayaan , anggaran dapat difokuskan pada sub kegiatan lain.
	Administra si Pendapata n Daerah Kewenanga n Perangkat Daerah		Jumlah Dokum en Admini strasi Pendap atan Daerah Kewena ngan Perang kat	1	Doku men	10,000,000	Administra si Pendapata n Daerah Kewenanga n Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Administra si Pendapata n Daerah Kewenanga n Perangkat Daerah.	1	Doku men	10,000,000	

			Daerah.										
	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	DKP Kutai Kartanegara, Tenggarong.	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	1	Dokumen	10,000,000	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	DKP Kutai Kartanegara, Tenggarong.	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	1	Dokumen	10,000,000	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian.	3	Dokumen	125,000,000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian.	1	Dokumen	125,000,000	
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	DKP Kutai Kartanegara, Tenggarong.	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1	Dokumen	25,000,000	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	DKP Kutai Kartanegara, Tenggarong.	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1	Dokumen	25,000,000	

	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	DKP Kutai Kartanegara, Tenggarong.	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian.	1	Dokumen	25,000,000	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	DKP Kutai Kartanegara, Tenggarong.	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian.	1	Dokumen	25,000,000	
	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	DKP Kutai Kartanegara, Tenggarong.	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1	Dokumen	25,000,000	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	DKP Kutai Kartanegara, Tenggarong.	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1	Dokumen	25,000,000	
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	DKP Kutai Kartanegara, Tenggarong.	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan	10	Orang	50,000,000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	DKP Kutai Kartanegara, Tenggarong.	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan	10	Orang	50,000,000	

			Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan					ng.	Perundang-Undangan				
	Administrasi Umum Perangkat Daerah.		Jumlah ASN Kelautan dan Perikanan Yang Mendapatkan Layanan	110	ASN	745,750,000	Administrasi Umum Perangkat Daerah.		Jumlah ASN Kelautan dan Perikanan Yang Mendapatkan Layanan	110	ASN	845,750,000	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	DKP Kutai Kartanegara, Tenggaring.	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan	1	Paket	3,750,000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	DKP Kutai Kartanegara, Tenggaring.	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan.	1	Paket	3,750,000	

			Kantor yang Disediakan.										
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	DKP Kutai Kartanegara, Tenggarong.	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	Paket	100,000,000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	DKP Kutai Kartanegara, Tenggarong.	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	Paket	100,000,000	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	DKP Kutai Kartanegara, Tenggarong.	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan.	1	Paket	50,000,000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	DKP Kutai Kartanegara, Tenggarong.	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan.	1	Paket	50,000,000	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	DKP Kutai Kartanegara, Tenggarong.	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang	1	Paket	50,000,000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	DKP Kutai Kartanegara, Tenggarong.	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	Paket	50,000,000	

			Disedia kan										
	Penyed iaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang -Undangan	DKP Kutai Karta negara, Tengg arong.	Jumlah Dokum en Bahan Bacaan dan Peratur an Perund ang- Undang an yang Disedia kan.	1	Doku men	42,000,000	Penyedia an Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan	DKP Kutai Kart anegara, Tengg arong.	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan.	1	Doku men	42,000,000	
	Fasilit asi Kunjungan Tam u	Wilay ah Kabup aten Kutai Karta negara a	Jumlah Lapora n Kunjun gan Tam u	-	-	-	Fasilit asi Kunjungan Tam u	DKP Kutai Kart anegara, Tengg arong.	Jumlah Laporan Kunjungan Tam u	1	Lapoa n	100,000,00 0	Penambahan Sub Kegiatan untuk fasilitasi Tam u.
	Penyel enggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Di Dala m Daera h dan Di	Jumlah Lapora n Penyela nggaraan Rapat	30	Lapo ran	450,000,00 0	Penyelen ggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Di Dala m Daer ah dan	Jumlah Laporan Penyelenga raan Rapat Koordinasi dan	30	Lapora n	450,000,00 0	

	SKPD	Luar Daerah	Koordinasi dan Konsultasi SKPD				SKPD	Di Luar Daerah	Konsultasi SKPD				
	Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD	DKP Kutai Kartanegara, Tenggarong.	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1	Dokumen	50,000,000	Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD	DKP Kutai Kartanegara, Tenggarong.	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1	Dokumen	50,000,000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah Unit Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Daerah Diadakan	-	Unit	-	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah Unit Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Daerah Diadakan	2	Unit	1,020,000,000	

	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	DKP Kutai Kartanegara, Tenggarong.	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	-	Unit	-	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	DKP Kutai Kartanegara, Tenggarong.	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	10	Unit	570,000,000	Penggantian Kendaraan Dinas Jabatan Fungsional (Roda Dua) yang sudah memasuki usia 10th pemakaian
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	DKP Kutai Kartanegara, Tenggarong.	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan.	-	Unit	-	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	DKP Kutai Kartanegara, Tenggarong.	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan.	2	Unit	450,000,000	Penambahan anggaran untuk pembelian Generator Set 20KVA untuk Dinas Kabupaten untuk mengganti Genset Dinas yang sudah sering rusak dengan usia pemakaian diatas 10th, Pembelian

													Genset Portable untuk kegiatan diluar kantor
	Pengadaan Gedung Kantor	DKP Kutai Kartanegara dan BBI Perjawa	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangun Lainnya Disediakan	-	-	Pengadaan Gedung Kantor	DKP Kutai Kartanegara dan BBI Perjawa	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangun Lainnya Disediakan					
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.	3 Laporan	1,485,898,124	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.	3 Laporan	1,485,898,124			

	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	DKP Kutai Kartanegara, Tenggarong.	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan.	1	Laporan	250,000,000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	DKP Kutai Kartanegara, Tenggarong.	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan.	1	Laporan	250,000,000	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	DKP Kutai Kartanegara, Tenggarong.	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	Laporan	25,000,000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	DKP Kutai Kartanegara, Tenggarong.	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	Laporan	25,000,000	

	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	DKP Kutai Kartanegara, Tenggarong.	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1	Laporan	1,210,898,124	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	DKP Kutai Kartanegara, Tenggarong.	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1	Laporan	1,210,898,124	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan.	90	Persen	540,000,000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan.	90	Persen	540,000,000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan	DKP Kutai Kartanegara, Tenggarong.	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas	23	Unit	115,000,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak	DKP Kutai Kartanegara, Tenggarong.	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas	23	Unit	115,000,000	

	Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	arong.	atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	garong.	Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak, dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.	DKP Kutai Kartanegara, Tenggara.	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	19	Unit	95,000,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak, dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.	DKP Kutai Kartanegara, Tenggara.	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	21	Unit	95,000,000	

	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	DKP Kutai Kartanegara, Tenggarong.	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2	Unit	50,000,000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	DKP Kutai Kartanegara, Tenggarong.	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2	Unit	50,000,000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	DKP Kutai Kartanegara, Tenggarong.	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir rehabilitasi	3	Unit	230,000,000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	DKP Kutai Kartanegara, Tenggarong.	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir rehabilitasi	2	Unit	230,000,000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	DKP Kutai Kartanegara, Tenggarong.	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1	Unit	50,000,000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	DKP Kutai Kartanegara, Tenggarong.	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir rehabilitasi	1	Unit	50,000,000	

			yang Dipelihara/Dirhabilitasi.						i.				
	URUSAN						URUSAN						
	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP		Produksi Perikanan Tangkap	95,172	Ton	25,745,000,000	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP		Produksi Perikanan Tangkap	95,172	Ton	60,898,600,000	
	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten		Jumlah Nelayan Terfasilitasi Sarana Penangkapan Ikan.	1,777	Nelayan	16,875,000,000	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota		Jumlah Nelayan Terfasilitasi Sarana Penangkapan Ikan.	2,000	Nelayan	26,398,600,000	

	/ Kota												
	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Kabupaten Kukar	Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia.	2	Dokumen	220,000,000	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Kabupaten Kukar.	Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/ Kota yang Tersedia.	2	Dokumen	220,000,000	
	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Kecamatan Sambodan Kecamatan Anggana.	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia.	3	Unit	6,000,000,000	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Kecamatan Sambodan Kecamatan Anggana.	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia.	4	Unit	6,000,000,000	

	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Kec.Samboja, Muara Jawa, Anggana, Sangasanga, Muara Badak, Marangkayu.Muara Kaman, Kota Bangun, Muara Wis, Muara Muntai,	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia	1350	Unit	10,655,000,000	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Kec. Samboja, Muara Jawa, Anggana, Sangasanga, Muara Badak, Marangkayu.Muara Kaman, Kota Bangun, Muara Wis, Muara	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia					Sub Kegiatan Mengalami Pemutakhiran berganti nama
--	--	--	--	------	------	----------------	--	---	--	--	--	--	--	---

		Kenohan, Kembang Janggut.						Muntai, Kenohan, Kembang Janggut.					
						Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Kec. Samboja, Muara Jawa, Anggana, Sangga-Sangga, Muara Bada, Marangkayu.M	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia	4,397	Unit	20,178,600,000	(1) Sub Kegiatan Baru Hasil Pemutakhirabn dari Sub Kegiatan Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap (2) Rencana Strategis OPD : Peningkatan Produksi dan Produktivitas serta Nilai Tambah Sektor Perikanan (3) Pilot Project kapal berbahan	

								uara Kam an, Kota Bang un, Muar a Wis, Muar a Munt ai, Keno han, Kem bang Jang gut.					fiberglass (4) Pembangunan Pertanian Bernasis Kawasan
	Pemberday aan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten /Kota		Jumlah KUB Naik Kelas	8	KUB	8,270,000,0 00	Pemberdaya an Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/ Kota		Jumlah KUB Naik Kelas	20	KUB	32,800,000, 000	
			Jumlah Nelayan Miskin dan	500	Oran g				Jumlah Nelayan Miskin dan Rentan	2,500	Orang		

			Rentan Miskin Terfasili tasi Sarana Penang kapan Ikan						Miskin Terfasilitasi Sarana Penangkapa n Ikan				
	Penge mbangan Kapasitas Nelayan Kecil	Kec. Samb oja, Muar a Jawa, Sanga - Sanga , Angga na, Muar a Bada k, Mara ngkayu, Muar a Kama n,	Jumlah Nelayan Kecil yang Mening kat Kapasit asnya	840	Oran g	7,670,000,0 00	Pengem bangan Kapasitas Nelayan Kecil	Kec. Sam boja, Muar a Jawa , Sang a- Sang a, Angg ana, Muar a Bada k, Mara ngka yu, Muar a Kam	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasny a	500	Orang	31,500,000, 000	(1) Pemenuhan Target Pengentasan Kemiskinan Pelaku usaha Perikanan Tangkap (Nelayan). (2) Pelatihan Nelayan

		Kota Bangun, Keno han, Muar a Wis, Muar a Munt ai.						an, Kota Bang un, Keno han, Muar a Wis, Muar a Munt ai.					
	Pelaks anaan Fasilitasi Pembentuk an dan Pengemban gan Kelembaga an Nelayan Kecil	Kec. Samb oja, Muar a Jawa, Sanga - Sanga , Angga na, Muar a Bada k, Mara ngkay	Jumlah Kelomp ok Nelayan Kecil yang Difasilit asi Pembenu tukan dan Pengem banan Kelemb agaann ya.	100	Kelo mpo k	300,000,00 0	Pelaksa naan Fasilitasi Pembentuk an dan Pengembang an Kelembagaa n Nelayan Kecil	Kec. Sam boja, Muar a Jawa , Sang a-Sang a, Angg ana, Muar a Bada k, Mara	Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentuk an dan Pengembang an Kelembagaa nnya.	50	Kelom pok	300,000,00 0	

		u, Muar a Kama n, Kota Bang un, Keno han, Muar a Wis, Muar a Munt ai.						ngka yu, Muar a Kam an, Kota Bang un, Keno han, Muar a Wis, Muar a Munt ai.					
	Pelaks anaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan , Bantuan Pembiayaa n, Kemitraan Usaha	Kec. Samb oja, Muar a Jawa, Sanga - Sanga , Angga na, Muar	Jumlah Unit Usaha yang Difasilit asi Penyalu ran Bantua n Pen Danaan , Bantua	100	Unit Usah a	300,000,00 0	Pelaksa naan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Kec. Sam boja, Muar a Jawa , Sang a- Sang a, Angg ana,	Jumlah Unit Usaha yang Difasilitasi Penyaluran Bantuan Pen Danaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	100	Unit Usaha	1,000,000,0 00	Diperlukan dalam rangka fasilitasi pertemuan /rembuk Nelayan. (Pertemuan Penyuluh Swadaya, Pembudidaya Ikan, Pengusaha dan Lembaga Pembiayaan,

		a Bada k, Mara ngkayu, Muar a Kama n, Kota Bang un, Keno han, Muar a Wis, Muar a Munt ai.	n Pemia yaan, Kemitra an Usaha					Muar a Bada k, Mara ngka yu, Muar a Kam an, Kota Bang un, Keno han, Muar a Wis, Muar a Munt ai.					KTNA)
	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)		Jumlah TPI Beroperasi	1	Unit	50,000,000	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)		Jumlah TPI Beroperasi	2	Unit	500,000,000	

	Penetapan Prosedur Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Desa Kota Bangun Ilir, Kec. Kota Bangun, Desa Muara Badak Ilir, Kec. Muara Badak, Desa Kutai Lama, Kec. Anggana, Kelurahan Kuala Samboja, Kec.	Jumlah SOP Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	1	Dokumen	-	Penetapan Prosedur Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Desa Kota Bangun Ilir, Kec. Kota Bangun, Desa Muara Badak Ilir, Kec. Muara Badak, Desa Kutai Lama, Kec. Anggana, Kelurahan Kuala Sam	Jumlah SOP Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	-	Dokumen	-	Kegiatan dapat dilaksanakan tanpa anggaran
--	---	--	---	---	---------	---	---	--	---	---	---------	---	--

		Samb oja.						boja, Kec. Sam boja.					
	Pelaya nan Penyeleng garaan Tempat Pelelengan Ikan (TPI)	Desa Kota Bang un Iilir, Kec. Kota Bang un, Desa Muar a Bada k Iilir, Kec. Muar a Bada k, Desa Kutai Lama, Kec. Angga na, Kelur ahan	Jumlah Layana n dalam rangka Penyele nggaraa n Tempat Pelelan gan Ikan (TPI)	3	Laya nan	50,000,000	Pelayana n Penyeleng gaan Tempat Pelelengan Ikan (TPI)	Desa Kota Bang un Iilir, Kec. Kota Bang un, Desa Muar a Bada k Iilir, Kec. Muar a Bada k, Desa Kutai Lam a, Kec. Angg ana, Kelur	Jumlah Layanan dalam rangka Penyeleng gaan Tempat Pelelengan Ikan (TPI)	3	Layan an	500,000,00 0	Untuk peningkatan Kualitas Layanan dalam mendukung optimalisasi operasional TPI.

		Kuala Sambaja, Kec. Sambaja.						ahan Kuala Sambaja, Kec. Sambaja.					
	Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu)		Jumlah Tanda Daftar Kapal Perikanan diterbitkan	2,000	Tanda Daftar Kapal Perikanan	500,000,000	Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/		Jumlah Tanda Daftar Kapal Perikanan diterbitkan	2,000	Tanda Daftar Kapal Perikanan	1,050,000,000	

	Daerah Kabupaten /Kota						Kota						
	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran Sampai Dengan 10 GT	Kutai Kartanegara.	Jumlah Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Perizinan Berusaha Perikanan Tangkap yang Menjadi Kewenangan Kabupa	1	Dokumen	-	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran Sampai Dengan 10 GT	Kutai Kartanegara.	Jumlah Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Perizinan Berusaha Perikanan Tangkap yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/ Kota.	2	Dokumen	50,000,000	Penyediaan Dokumen SOP Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan.

			ten/Kota.										
	Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran Sampai Dengan 10 GT	Kec. Sambaja, Muara Jawa, Sangasanga, Anggana, Muara Badak, Marangkayu, Muara Kama	Jumlah Rekomendasi Tanda Daftar Kapal Perikanan	2000	Rekomendasi	500,000,000	Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran Sampai Dengan 10 GT	Kec. Sambaja, Muara Jawa, Sangasanga, Anggana, Muara Badak, Marangkayu.	Jumlah Rekomendasi Tanda Daftar Kapal Perikanan	2000	Rekomendasi	1,000,000,000	Dalam Rangka pemenuhan persyaratan untuk Ketersediaan SPBN

		n, Kota Bang un, Keno han, Muar a Wis, Muar a Munt ai.											
	Pendaftar an Kapal Perikanan Berukuran Sampai Dengan 10 GT yang Beroperasi di Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Dusahaka n dalam 1 (Satu)		Jumlah Kapal Perikan an Beruku ran sampai 10 GT Terdaft ar	1,50 0	Kapa l	50,000,000	Pendaftar an Kapal Perikanan Berukuran Sampai Dengan 10 GT yang Beroperasi di Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Dusahakan dalam 1 (Satu) Daerah		Jumlah Kapal Perikanan Berukuran sampai 10 GT Terdaftar	1,500	Kapal	150,000,00 0	

	Daerah Kabupaten / Kota						Kabupaten/ Kota						
	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran Sampai Dengan 10 GT	Muaraka, Kota Bangun, Kengan, Muarawis, Muarai.	Jumlah Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Buku Kapal Perikanan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota.	1	Dokumen	-	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran Sampai Dengan 10 GT	Muaraka, Kota Bangun, Kengan, Muarawis, Muarai.	Jumlah Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Buku Kapal Perikanan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/ Kota.	1	Dokumen	50,000,000	

	Pelayan Penerbitan Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran Sampai Dengan 10 GT	Muar a Kama n, Kota Bang un, Keno han, Muar a Wis, Muar a Munt ai.	Jumlah Rekome ndasi Buku Kapal Perikan an (BKP) yang Diterbit kan.	1500	Reko men dasi	50,000,000	Pelayana n Penerbitan Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran Sampai Dengan 10 GT						Sub Kegiatan Mengalami Pemutakhiran berganti nama
							Penerbit an rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP)	Muar a Kam an, Kota Bang un, Keno han, Muar a Wis, Muar a Munt ai.	Jumlah Rekomendas i Buku Kapal Perikanan (BKP) yang Diterbitkan	5,000	Rekom endasi	100,000,00 0	Sub Kegiatan Baru Hasil Pemutakhirabn dari Sub Kegiatan Pelayanan Penerbitan Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran Sampai Dengan 10 GT

PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA		Produksi Perikanan Budidaya	185,608	Ton	29,726,000,000	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Produksi Perikanan Budidaya	185,608	Ton	64,060,000,000	
Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil		Jumlah POKDAKAN Bermitra	20	pokd akan	2,155,000,000	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah POKDAKAN Bermitra	50	pokd akan	4,705,000,000	
		Jumlah POKDAKAN Naik Kelas	5	pokd akan			Jumlah POKDAKAN Naik Kelas	20	pokd akan		
Pengembangan Kapasitas Pembudidaya Ikan Kecil	Wilayah Kutai Kartanegara	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas.	15	Kelompok	455,000,000	Pengembangan Kapasitas Pembudidaya Ikan Kecil	Wilayah Kutai Kartanegara	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas.	15	Kelompok	455,000,000

	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Kecamatan Sambaja, Muara Jawa, Sangga - Sangga, Anggana, Muara Badak, Marangkayu, Loajan, Loa Kulu, Tenggara Seberang, Tenggara, Sebul	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan.	100	Kelompok	150,000,000	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Kecamatan Sambaja, Muara Jawa, Sangga - Sangga, Anggana, Muara Badak, Marangkayu, Loajan, Loa Kulu, Tenggara	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan.	50	Kelompok	250,000,000	
--	---	--	--	-----	----------	-------------	---	--	--	----	----------	-------------	--

		u, Muar a Kama n, Kota Bang un, Keno han, Muar a Wis, Muar a Munt ai, Kemb ang Jangg ut, Taban g.						Sebe rang, Teng garo ng, Sebu lu, Muar a Kam an, Kota Bang un, Keno han, Muar a Wis, Muar a Munt ai, Kem bang Jang gut, Taba ng.					
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	Pelaksanaan Fasilitas Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Kecamatan Sambaja, Muara Jawa, Sangasanga, Anggana, Muara Badak, Marangkayu, Loajan, Loakulu, Tenggara Seberang, Tenggara, Sebul	Jumlah Kelompok Usaha yang terfasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usahan	30	Kelompok	200,000,000	Pelaksanaan Fasilitas Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Kecamatan Sambaja, Muara Jawa, Sangasanga, Anggana, Muara Badak, Marangkayu, Loajan, Loakulu, Tenggara	Jumlah Kelompok Usaha yang terfasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usahanya	100	Kelompok	1,000,000,000	Untuk memfasilitasi Rembuk Pembudidaya Ikan (Pertemuan Penyuluh Swadaya, Pembudidaya Ikan, Pengusaha dan Lembaga Pembiayaan, KTNA)
--	--	--	--	----	----------	-------------	--	--	--	-----	----------	---------------	--

		u, Muar a Kama n, Kota Bang un, Keno han, Muar a Wis, Muar a Munt ai, Kemb ang Jangg ut, Taban g.						Sebe rang, Teng garo ng, Sebu lu, Muar a Kam an, Kota Bang un, Keno han, Muar a Wis, .Mua ra Munt ai, Kem bang Jang gut, Taba ng.					
--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--

	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Kecamatan Sambaja Jawa, Sanggalang, Anggana, Muarabada, Marangkayu, Loajan, Tenggara, Seberang, Tenggara, Sebulu,	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Penda mpingan, Kemud ahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informa si, Serta Penyele nggaraan Pendidika n dan Pelatih an	30	Kelompok	1,350,000,000	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Kecamatan Sambaja, Muaraja, Sanggalang, Sangana, Anggana, Muarabada, Marangkayu, Loajan, Tenggara, Seberang, Tenggara,	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	500	Kelompok	3,000,000,000	Rencana Priritas OPD : Peningkatan Produksi dan Produktivitas serta Nilai Tambah Sektor Perikanan (Pelatihan dan Pendampingan SDM dan Kelembagaan)
--	---	---	---	----	----------	---------------	---	--	---	-----	----------	---------------	---

		Muar a Kama n, Kota Bang un, Keno han, Muar a Munt ai, Kemb ang Jangg ut, Taban g.						garo ng, Sebu lu, Muar a Kam an, Kota Bang un, Keno han, Muar a Munt ai, Kem bang Jang gut, Taba ng.					
	Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1		Jumlah Tanda Daftar Pembu didaya Ikan Diterbit kan	1000	TDPI	200,000,00 0	Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu)		Jumlah Tanda Daftar Pembudiday a Ikan Diterbitkan	1000	TDPI	200,000,00 0	

	(satu) daerah kabupaten/kota						daerah kabupaten/kota						
	Penetapan persyaratan dan prosedur penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudidayaan Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Kecamatan Tenggara.	Jumlah Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Perizinan Usaha Skala Mikro dan Kecil bagi Pembudidayaan Ikan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang	100	Rekomendasi	-	Penetapan persyaratan dan prosedur penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudidayaan Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Kecamatan Tenggara.	Jumlah Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Perizinan Usaha Skala Mikro dan Kecil bagi Pembudidayaan Ikan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan.	100	Rekomendasi	-	

			Ditetapkan.										
	Pelayan penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudidaya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) daerah kabupaten /kota	Kecamatan Sambaja, Muara Jawa, Sanggana, Sanggana, Anggana, Muara Badak, Marangkayu, Loajan, Loakulu, Tenggara, Seberang, Tenggara	Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha bagi Pembudidayaan Ikan Kecil yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	1000	Rekomendasi	200,000,000	Pelayan penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudidayaan Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Kecamatan Sambaja, Muara Jawa, Sanggana, Sanggana, Anggana, Muara Badak, Marangkayu, Loajan, Loakulu, Tenggara	Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha bagi Pembudidayaan Ikan Kecil yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	1000	Rekomendasi	200,000,000	

		arong, Sebulu, Muar a Kama n, Kota Bang un, Keno han, Muar a Wis, Muar a Munt ai, Kemb ang Jangg ut, Taban g.						garo ng Sebe rang, Teng garo ng, Sebu lu, Muar a Kam an, Kota Bang un, Keno han, Muar a Wis, Muar a Munt ai, Kem bang Jang gut, Taba ng.					
--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan		Jumlah Pembudidayaan Ikan Terfasilitasi Sarana dan Prasarana Budidaya Ikan.	1908	Pembudidaya	27,371,000,000	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan		Jumlah Pembudidayaan Ikan Terfasilitasi Sarana dan Prasarana Budidaya Ikan.	2078	Pembudidaya	59,155,000,000	
	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Di Wilayah Kutai Kartanegara dan Luar Daerah.	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1	Dokumen	100,000,000	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Di Wilayah Kutai Kartanegara dan Luar Daerah.	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1	Dokumen	150,000,000	Peningkatan Kualitas Data Statistik Budidaya.

	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten /Kota	Desa Tanjung Limau, Kecamatan Muar Bada k.	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	45	Unit	5,950,000,000	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Desa Tanjung Limau, Kecamatan Muar Bada k, Kecamatan Loa Kulu, Loa Jana n, Teng garo ng, Teng garo ng Sebe rang, Sam boja, Muar	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	27	Unit	33,500,000,000	Pembangunan / Rehab UPR/HSRT. (Pemenuhan Target Renstra)
--	---	--	--	----	------	---------------	---	---	---	----	------	----------------	--

								a Jawa , Angg ana, Muar a Bada k.					
	Penja minan Ketersedia an Sarana Pembudida yaan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten /Kota	samb oja, Muar a Jawa, Sanga - Sanga , Angga na, Muar a Bada k, Mara ngkay u, Loa Janan , Loa Kulu,	Jumlah Sarana Pembu didayaa n Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupa ten/Kot a	2350	Unit	21,121,000, 000	Penjami nan Ketersediaan Sarana Pembudiday aan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	samb oja, Muar a Jawa , Sang a- Sang a, Angg ana, Muar a Bada k, Mara ngka yu, Loa Jana	Jumlah Sarana Pembudiday aan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	98133 0	Unit	25,305,000, 000	Peningkatan Produksi dalam rangka menyambut IKN dan Pengembangan Budidaya Kerang Dara dan Vanamae

		Tengg arong Seber ang, Tengg arong, Sebul u, Muar a Kama n, Kota Bang un, Keno han, Muar a Wis, Muar a Munt ai, Kemb ang Jangg ut, Taban g.						n, Loa Kulu , Teng garo ng Sebe rang, Teng garo ng, Sebu lu, Muar a Kam an, Kota Bang un, Keno han, Muar a Wis, Muar a Munt ai, Kem					
--	--	---	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--

								bang Jang gut, Taba ng.					
	Pengel olaan Kesehatan Ikan dan Lingkunga n Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten /Kota	Kec. Angga na, Loa Kulu, Kota Bang un, Muar a Munt ai, Tenggarong.	Jumlah Hasil Ikan dan Lingku ngan Budida ya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupa ten/Kota yang Teruji Melalui Pengelo laan Kesehat an Ikan	1	Doku men	200,000,00 0	Pengelol aan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Kec. Angg ana, Loa Kulu , Kota Bang un, Muar a Munt ai, Teng garong.	Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan	1	Doku men	200,000,00 0	
	Pembi naan dan Pemantaua n Pembudida yaan Ikan	Wilay ah Kutai Karta negar a	Jumlah Pembu didaya yang Mempe roleh	-	Oran g	-	Pembina an dan Pemantauan Pembudiday aan Ikan di Darat.	Wilay ah Kutai Kart aneg ara	Jumlah Pembudiday a yang Memperoleh Pembinaan dan	-	Orang	-	

	di Darat.		Pembin aan dan Pemant auan Pembu didayaa n Ikan di Darat.					Pemantauan Pembudiday aan Ikan di Darat.					
	Perenc anaan, Pengemba ngan, Pemanfaat an dan Perlindung an Lahan Untuk Pembudida yaan Ikan di Darat	Wilayah Pesisir (Kecamat a Muara Badak, Marangkay u, Samb oja, Anggana dan Muara	Luas Lahan untuk Pembu didayaa n Ikan di Darat yang Direncan akan, Dikemb angkan , Dimanf aatkan dan Dilindu ngi.	-	Ha.	-	Perenca naan, Pengembang an, Pemanfaata n dan Perlindunga n Lahan Untuk Pembudiday aan Ikan di Darat	Wilayah Pesisir (Kecamat a Muara Badak, Marangkay u, Samb oja, Anggana dan Muara	Luas Lahan untuk Pembudiday aan Ikan di Darat yang Direncanaka n, Dikembangk an, Dimanfaatka n dan Dilindungi.	0	Ha.	-	

		Jawa)						Jawa					
	PROGRAM PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN		CAKUPAN WILAYAH SUMBERDAYA PERIKANAN YANG DIAWASI	20	Kecamatan	5,500,000,000	PROGRAM PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN		CAKUPAN WILAYAH SUMBERDAYA PERIKANAN YANG DIAWASI	20	Kecamatan	12,000,000,000	
			PERSENTASE KASUS ILEGAL DAN DESTRUKTIF FISHING YANG DITUNTASKAN.	95	Persen				PERSENTASE KASUS ILEGAL DAN DESTRUKTIF FISHING YANG DITUNTASKAN.	95	Persen		

	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten /Kota		Jumlah Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) yang Difasilitasi	3	POKMASWAS	5,500,000,000	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/ Kota		Jumlah Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) yang Difasilitasi	5	POKMASWAS	12,000,000,000	
			Jumlah Reservat Diawasi	3	Reservat				Jumlah Reservat Diawasi	3	Reservat		
			Jumlah Nelayan Mendapatkan Alat Tangkap Ramah Lingkungan	400	Nelayan				Jumlah Nelayan Mendapatkan Alat Tangkap Ramah Lingkungan	500	Nelayan		

	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten /Kota	Kecamatan Muara Kaman, Kota Bangun, Kengan, Muara Wis, Muara Muntai/Kabupaten Kutai Kartanegara.	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Sumber Daya Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota.	1	Dokumen	5,400,000,000	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/ Kota	Kecamatan Muara Kaman, Kota Bangun, Kengan, Muara Wis, Muara Muntai/Kabupaten Kutai Kartanegara.	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Sumber Daya Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/ Kota.					Sub Keg mengalami Pemutakhiran berganti nama
--	--	--	---	---	---------	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--

							<p>Pengawasan usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota</p>	<p>Kecamatan Muara Kamantan, Kota Bangun, Kengan, Muara Wis, Muara Muntai/Kabupaten Kutai Kartanegara.</p>	<p>Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota</p>	<p>100</p>	<p>Pelaku Usaha</p>	<p>11,900,000,000</p>	<p>Sub Kegiatan Baru Hasil Pemutakhirannya dari Sub Kegiatan Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	------------	---------------------	-----------------------	--

	Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidaya an Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan dalam Kabupaten /Kota	Kecamatan Samb oja, Muar a Jawa, Sanga - Sanga , Angga na, Muar a Bada k, Mara ngkayu, Loa Janan , Loa Kulu, Tenggarong Seberang, Tenggarong, Sebul	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota.	1	Dokumen	100,000,000	Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan dalam Kabupaten/ Kota	Kecamatan Samboja, Muar a Jawa , Sang a- Sang a, Angg ana, Muar a Bada k, Mara ngkayu, Loa Jana n, Loa Kulu , Tenggaro ng	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/ Kota.					Sub Keg mengalami Pemutakhiran berganti nama
--	---	---	---	---	---------	-------------	--	---	--	--	--	--	--	--

		u, Muar a Kama n, Kota Bang un, Keno han, Muar a Wis, Muar a Munt ai, Kemb ang Jangg ut, Taban g.						Sebe rang, Teng garo ng, Sebu lu, Muar a Kam an, Kota Bang un, Keno han, Muar a Wis, Muar a Munt ai, Kem bang Jang gut, Taba ng.					
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

							<p>Pengawasan usaha pembudidayaan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota</p>	<p>Kecamatan Samboja, Muara Jawa, Sangga-Sangga, Anggana, Muara Badak, Marangayu, Loajan, Loakulu, Tenggarong</p>	<p>Jumlah pelaku usaha pembudidayaan ikan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan kabupaten/kota</p>	<p>10</p>	<p>Pelaku Usaha</p>	<p>100,000,000</p>	<p>Sub Kegiatan Baru Hasil Pemutakhiran dari Sub Kegiatan Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota</p>
--	--	--	--	--	--	--	---	---	--	-----------	---------------------	--------------------	---

								Sebe rang, Teng garo ng, Sebu lu, Muar a Kam an, Kota Bang un, Keno han, Muar a Wis, Muar a Munt ai, Kem bang Jang gut, Taba ng.					
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN		Produksi Pengolahan Hasil Perikanan	25,095	Ton	1,900,000,000	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN		Produksi Pengolahan Hasil Perikanan	25,095	Ton	10,300,000,000	
			Eskpor Produk Kelautan dan Perikanan	1,687	Ton				Eskpor Produk Kelautan dan Perikanan	1,687	Ton		
	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro Dan Kecil		Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Memiliki Tanda Daftar Usaha Pengolahan	10	Tanda Daftar Usaha.	150,000,000	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro Dan Kecil		Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Memiliki Tanda Daftar Usaha Pengolahan	10	Tanda Daftar Usaha.	550,000,000	

	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten /Kota	Kec. Tenggarong, Sambaja, Muara Jawa, Anggana, Muara Badak, Kota Bangun, Muara Wis, Muara Muntai.	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan Skala Usaha dan Risiko.	1	Dokumen	150,000,000	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Kec. Tenggarong, Sambaja, Muara Jawa, Anggana, Muara Badak, Kota Bangun, Muara Wis, Muara Muntai.	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan Skala Usaha dan Risiko.	1	Dokumen	250,000,000	
							Pelaksanaan verifikasi perizinan berusaha	Kec. Sambaja, Muara	Jumlah rekomendasi perizinan berusaha sesuai	5	Rekomendasi	300,000,000	Penambahan sub kegiatan sebagai percontohan unit pengolah

							sesuai dengan standar usaha bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan berdasarkan skala usaha dan tingkat risiko	Jawa , Anggana, Sang a-Sang a, Muara Bada k, Marangka yu, Teng garo ng, Kota Bang un, Muara Kam an, Muara Wis, Muara Munt	dengan standar usaha bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan berdasarkan skala usaha dan tingkat risiko				yang berstadar Nasional
--	--	--	--	--	--	--	--	---	---	--	--	--	-------------------------

								ai, Keno han.					
	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil		Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Yang Menerapkan Standar Mutu	5	Unit Usaha	250,000,000				15	Unit Usaha	500,000,000	
	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan Atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan	Kec.Samboja, Muara Jawa, Anggana, Sanga - Sanga, Muara Bada	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan	15	Unit Usaha	250,000,000							Sub Keg mengalami Pemutakhiran berganti nama

							Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	Kec. Samboja, Muara Jawa, Anggana, Sanggana, Muara Badak, Marangyu, Tenggara, Kota Bangun, Muara Kaman, Muar	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang mendapatkan pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	15	Unit Usaha	500,000,000	Sub Keg Hasil Pemutakhiran dari Sub Keg Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan Atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil
--	--	--	--	--	--	--	---	--	---	----	------------	-------------	--

								a Wis, Muar a Munt ai, Keno han.					
	Penyediaan Dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten / Kota		Jumlah POKLA HSAR Difasilitasi Sarana Pengolahan dan Pemasaran.	25	POK LAH SAR.	1,500,000,000	Penyediaan Dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota		Jumlah POKLAHSAR Difasilitasi Sarana Pengolahan dan Pemasaran.	50	POKLA HSAR	9,250,000,000	
	Peningkatan Ketersediaan Ikan Untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu)	Kec. Tenggarong, Sambaja, Muara Jawa, Anggana,	Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan	50	Ton.	500,000,000	Peningkatan Ketersediaan Ikan Untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah	Kec. Tenggarong, Sambaja, Muara Jawa,	Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah	50	Ton.	4,000,000,000	Pendukung Kegiatan Penanganan Stunting.

	Daerah Kabupaten /Kota	Muar a Bada k, Kota Bang un, Muar a Wis, Muar a Munt ai.	Usaha Pengola han Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupa ten/Kot a.				Kabupaten/ Kota	Angg ana, Muar a Bada k, Kota Bang un, Muar a Wis, Muar a Munt ai.	Kabupaten/ Kota.				
	Pembe rian Fasilitas Bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten /Kota	Kec. Tenggarong, Samb oja, Muar a Jawa, Angga na, Muar a Bada k, Kota	Jumlah Pelaku Usaha Perikan an Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupa ten/Kot a	20	Pelaku Usaha.	1,000,000,0 00	Pemberi Fasilitas Bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Kec. Tenggarong, Sam boja, Muar a Jawa , Angg ana, Muar a Bada	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota yang Terfasilitasi.	50	Pelaku Usaha.	5,250,000,0 00	

		Bangun, Muar a Wis, Muar a Munt ai.	yang Terfasili tasi.					k, Kota Bang un, Muar a Wis, Muar a Munt ai.				
						81,774,308 ,130						166,680,44 3,487

Berdasarkan hasil analisis terhadap rancangan RKPD Dinas Kelautan dan Perikanan, terdapat Koreksi pada beberapa kegiatan sehingga mengalami perubahan dan berdampak pada penambahan maupun pengurangan anggaran, sebagai akibat dari penyesuaian terhadap beberapa kebijakan, maupun urgensi dari kegiatan itu sendiri.

Terdapat juga 5 sub kegiatan yang mengalami pemutakhiran pada SIPD RI walaupun pada Kepmen 900 masih ada disebutkan, sehingga perlu penyesuaian Kembali terhadap sub kegiatan yang mengalami pemutakhiran. Sub Kegiatan yang mengalami pemutakhiran merupakan sub kegiatan yang penting jadi penyesuaian Kembali sangat diperlukan dan ini berdampak kepada evaluasi renstra.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Rancangan Renja Dinas Kelautan dan Perikanan Kutai Kartanegara memberi ruang untuk mengakomodir Usulan dari para pemangku kepentingan, seperti masyarakat secara langsung maupun melalui badan legislatif (anggota DPRD), LSM, Akademisi, maupun lintas OPD melalui mekanisme Musrenbang, baik pada tingkat Kecamatan selanjutnya didiskusikan dalam pembahasan forum OPD Kabupaten maupun Musrenbang Kabupaten. Pembahasan dilakukan untuk menyelaraskan rumusan rancangan Renja dengan usulan dari hasil musrenbang OPD kabupaten di tingkat Kecamatan. Usulan para pemangku kepentingan ini, masih sejalan dengan isu-isu penting penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan seperti yang tercermin pada Program dan Kegiatan dalam Dokumen Renstra Kelautan dan Perikanan Kutai Kartanegara 2021-2026.

Kesesuaian usulan pemangku kepentingan dengan program kerja dari Dinas Kelautan dan Perikanan tidak terlepas dari adanya proses pelaksanaan kegiatan Musrenbang baik tingkat Kecamatan maupun pada Kabupaten yang berjalan sangat baik. Beberapa masukan dan usulan dari para pemangku kepentingan terhadap Dinas Kelautan dan Perikanan Kutai Kartanegara, disampaikan dalam table TC.32 di bawah.

Tabel TC.32. Usulan Program dan Kegiatan Para Pemangku Kepentingan Tahun Rencana 2025 Kabupaten Kutai Kartanegara.

Perangkat Daerah : Dinas Kelautan dan Perikanan Kutai Kartanegara.

No	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP				
	Kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota.				
	Sub Kegiatan Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap				
1	KUB Cahaya Laut	Muara Badak Ilir	Kapal Mesin	12 Unit 12 Unit	Musrenbang
2		Long Beleh Haloq, Kab. Kutai Kartanegara	Perahu Alat Tangkap	12 Unit 200 Unit	Musrenbang
3		Jl. Jembatan Ulin Poros Pela RT 002, Kab. Kutai Kartanegara	Mesin Kapal	10 Unit	Musrenbang
4	KUB BERKAH Desa Muara Kaman Ilir	Desa Muara Kaman Ilir, Kab. Kutai Kartanegara	Alat Tangkap	200 Unit	Musrenbang
5		Desa Sedulang , Kab. Kutai Kartanegara	Perahu Mesin Ces	10 Unit 10 Unit	Musrenbang
6		KUB Se kelurahan Dondang Jalan	Perahu	30 Unit	Musrenbang

		Ahmad Sifa Rt.13 kelurahan Dondang Lat 0°78607° Long 117.23124° P. 4 Kelurahan Dondang , Kab. Kutai Kartanegara	Mesin Ces	30	Unit	
7		Desa Teratak, Kab. Kutai Kartanegara	Rengge	200	Piss	Musrenbang
8		Kelompok Tambak Sinar Baru, Kab. Kutai Kartanegara	Perahu Mesin Ces	12 12	Unit Unit	Musrenbang
9		Tanjung Harapan RT.01 , Kab. Kutai Kartanegara	Kapal Mesin	10 10	Unit Unit	Musrenbang
10	KUB Pantai Harapan	Tanjung Harapan RT 05 , Kab. Kutai Kartanegara	Perahu Mesin Ces	12 12	Unit Unit	Musrenbang
11		Desa Liang Buaya, Kab. Kutai Kartanegara	Kawat Pengilar	600	Roll	Musrenbang
12	Kelompok Usaha Bersama "Karya Bersatu"	Dusun Delta Mahakam, RT. 016, Kab. Kutai Kartanegara	Mesin Ces	30		Musrenbang
13	Kel Nelayan Berkah Bersama	Jalan Abdullah RT 014 Desa sebulu Ilir Kecamatan Sebulu , Kab. Kutai Kartanegara	Rengge	200	Piss	Musrenbang
14		Desa Santan Tengah 0.01175249°S 117,46656367°E , Kab. Kutai Kartanegara	Rengge	200	Piss	Musrenbang
15		Desa Santan Tengah Nelayan Cahaya Santan RT.04, Kab. Kutai Kartanegara	Kapal	10	Unit	Musrenbang

16		Perkumpulan Nelayan Berkah Marangkayu RT.04 Desa Santan Tengah, Kab. Kutai Kartanegara	Kapal	10	Unit	Musrenbang
17		KUB Karya Santan Bersatu RT.12 Desa Santan Tengah, Kab. Kutai Kartanegara	Kapal	10	Unit	Musrenbang
18		JL.RIMBA AYU RT.007 DESA KEDANG MURUNG, Kab. Kutai Kartanegara	Kawat Pengilar	600	Roll	Musrenbang
19	KUB Nalayan Cipta Mandiri	Jalan Swadaya RT.02 (Koordinat ; 521324, 9911086, Kab. Kutai Kartanegara	Perahu	20	Unit	Musrenbang
20	NELAYAN BELIDA JAYA	JL. K.H AGUS SALIM RT.04, Kab. Kutai Kartanegara	Mesin Ces	12		Musrenbang
21	Kelompok Nelayan "Jarai Mahkota"	Muara Kaman Ulu Jl. Jend. Sudirman RT. 003, Kab. Kutai Kartanegara	Perahu Mesin Ces	12 12	Unit Unit	Musrenbang
22		Desa Long Beleh Haloq, Kab. Kutai Kartanegara	Mesin Ces	12		Musrenbang
23		Jl. jembatan ulin poros Pela RT 002, Kab. Kutai Kartanegara	Perahu Mesin Ces	12 12	Unit Unit	Musrenbang
24		Jalan. Jembatan Ulin Poros 1 Rt 006, Kab. Kutai Kartanegara	Perahu Mesin Ces	12 12	Unit Unit	Musrenbang
25		Jl. jembatan ulin poros pela RT 005, Kab. Kutai Kartanegara	Perahu Mesin Ces	12 12	Unit Unit	Musrenbang
26		Jl. jembatan ulin poros pela	Perahu	12	Unit	Musrenbang

		RT 001, Kab. Kutai Kartanegara	Mesin Ces	12	Unit	
27	KUB RAKAT	Desa Muara Kaman Ilir, Kab. Kutai Kartanegara	Kawat Pengilar	600	Roll	Musrenbang
28		Sebemban RT. 04, Kab. Kutai Kartanegara	Mesin Ces	12	Unit	Musrenbang
29	Kelompok Preyan	Sebemban RT. 05, Kab. Kutai Kartanegara	Mesin Ces	12	Unit	Musrenbang
30	kelompok Luah Preyan	Sebemban RT. 05, Kab. Kutai Kartanegara	Perahu	12	Unit	Musrenbang
31	KUB Jembatan Satu	Sebemban RT. 01, Kab. Kutai Kartanegara	Mesin Ces	12	Unit	Musrenbang
32	Kl Luah Monen	Sebemban RT. 02, Kab. Kutai Kartanegara	Mesin Ces	12	Unit	Musrenbang
33	KUB Maju Bersama	Sebemban, Kab. Kutai Kartanegara	Mesin Ces	12	Unit	Musrenbang
34		RT 24 Desa Sebuntal, Kab. Kutai Kartanegara	Rengge	200	Piss	Musrenbang
35		Desa Teratak, Kab. Kutai Kartanegara	Kawat Pengilar	600	Roll	Musrenbang
36		Desa Teratak, Kab. Kutai Kartanegara	Perahu	25	Unit	Musrenbang
37		Desa Teratak, Kab. Kutai Kartanegara	Mesin Ces	25	Unit	Musrenbang
38	Kelompok Usaha Bersama (KUB) Nelayan "Kedang Rantau"	Muara Kaman Ulu Dusun Danau Lipan, RT. 004, Kab. Kutai Kartanegara	Perahu Mesin Ces	12 12	Unit Unit	Musrenbang
39		Desa Kupang Baru, Kab. Kutai Kartanegara	Perahu Mesin Ces	20 20	Unit Unit	Musrenbang
40	Kelompok Usaha Bersama " Makmur Sentosa " RT 04 Teluk pemedas	Jl. Bpp-Handil II RT 04 Teluk Pemedas, Kab. Kutai Kartanegara	Rengge	200	Piss	Musrenbang

41	Kelompok nelayan "Sigagu Berkah"	Jl. Bpp-handil II RT 06 Teluk pemedas, Kab. Kutai Kartanegara	Rengge	200	Piss	Musrenbang
42	KUB Padadaan Semoga Jaya	Teluk Dalam Jalan Karya RT.03 (521826.65, 9910590.88), Kab. Kutai Kartanegara	Mesin Ces	12	Unit	Musrenbang
43		Desa Kelekat, Kab. Kutai Kartanegara	Perahu Mesin Ces	20 20	Unit Unit	Musrenbang
44	Kelompok nelayan 'Putra Mahakam'	Jl. Jend. A. Yani RT. 009, Kab. Kutai Kartanegara	Perahu Mesin Ces	20 20	Unit Unit	Musrenbang
45	KUB jahe sejatera	kel Pemedas kec samboja				Pokok Pikiran DPRD
46	Kelompok Nelayan "Putra Setia Raja Jaya"	Desa Muara Enggelam				Pokok Pikiran DPRD
47		Kahala Ilir	Perahu dan Mesin Ces			Pokok Pikiran DPRD
48	kelompok Bekayuh	Muara Aloh	perahu fiber			Pokok Pikiran DPRD
49	kelompok Bebintis	Kahala Ilir	perahu fiber			Pokok Pikiran DPRD
	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA					
	Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan					
	Sub Kegiatan Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota					
1	Bantuan Kelompok Bandeng Berkah Frezer dan cool	Muara Badak Ilir Jl. Kapitan Toko Lima, RT. 08, Kab. Kutai	Freezeer Coolbox	5 5	Unit Unit	Musrenbang

	box	Kartanegara			
2	Pembudidaya di Desa Wisata	RT 03 Desa Kota Bangun III , Kab. Kutai Kartanegara	Pakan	7,000	Kg Musrenbang
3		RT 11 Desa Kota Bangun III , Kab. Kutai Kartanegara	Kolam Terpal Pakan Bibit Lele	10 3,500 20,000	Unit Kg Kg Musrenbang
4		Jln. Erlian RT 004 Desa Sanggulan , Kab. Kutai Kartanegara	Pakan	7,000	Kg Musrenbang
5		Jl. Tambak Rel RT. 11 Kelurahan Baru Kecamatan Tenggarong, Kab. Kutai Kartanegara	Kolam Terpal	12	Unit Musrenbang
6		Jl. AM. Sangaji RT.04 Kelurahan Baru Kecamatan Tenggarong, Kab. Kutai Kartanegara	Keranba Jaring Apung	12	Unit Musrenbang
7		Jl. AM. Sangaji RT.09 Kelurahan Baru Kecamatan Tenggarong, Kab. Kutai Kartanegara	Keranba Jaring Apung	12	Unit Musrenbang
8		Jl. Aji Imbut RT.02 Kelurahan Baru Kecamatan Tenggarong, Kab. Kutai Kartanegara	Keranba Jaring Apung	12	Unit Musrenbang
9		Jl. Abdul Riso RT. 005 , Kab. Kutai Kartanegara	Keranba Jaring Apung	12	Unit Musrenbang
10		Jl. Abdul Riso RT. 005, Kab. Kutai Kartanegara	Bibit Ikan	30,000	ekor Musrenbang
11		Jl. Abdul Riso RT. 005, Kab. Kutai	Pakan Ikan	5,000	Kg Musrenbang

		Kartanegara				
12		Desa Sedulang, Kab. Kutai Kartanegara	KJA Bibit IKan Pakan	10 20,000 3,500	Unit ekor Kg	Musrenbang
13	POKDAKAN Sarining Toya	Dusun Mekar sari, RT 08, Kab. Kutai Kartanegara	Bibit Ikan Lele Pakan Ikan	35,000 5,000	ekor Kg	Musrenbang
14		Rantau hempang, Kab. Kutai Kartanegara	KJA Bibit IKan Pakan	10 20,000 3,500	Unit ekor Kg	Musrenbang
15		Bukit samboja indah RT 07 pembibitan ikan Jaka Tingkir kel.Wonotirto, Kab. Kutai Kartanegara	Pakan Ikan	5,000	Kg	Musrenbang
16		Poktan Surya Bakti RT 06 kel.Wonotirto, Kab. Kutai Kartanegara	Kolam Bak UPR	5	Unit	Musrenbang
17		Dusun Sidomulyo , Kab. Kutai Kartanegara	Bibit Ikan	30,000	ekor	Musrenbang
18		Kelurahan Tama Pole, Kab. Kutai Kartanegara	Bibit Ikan	30,000	ekor	Musrenbang
19		Desa Tanjung Batu, Kab. Kutai Kartanegara	KJA Bibit IKan Pakan	10 20,000 3,500	Unit ekor Kg	Musrenbang
20		Desa Teluk Bingkai Kecamatan Kenohan, Kab. Kutai Kartanegara	Bibit Ikan	30,000	ekor	Musrenbang
21		Desa Teluk Bingkai, Kab. Kutai Kartanegara	Pakan Ikan	5,000	Kg	Musrenbang
22	Kelompok Budi Daya Rumput	Tanjung Harapan RT 04,	Bibit Rumput	5,000	Kg	Musrenbang

	Laut PASIRAN JAYA BERKAH RT.4	Kab. Kutai Kartanegara	Laut			
23		Santan Tengah Dusun kampung masjid, Kab. Kutai Kartanegara	Rehab kolam UPR	1	Paket	Musrenbang
24		Jl. Jembatan Ulin Poros Pela RT 002, Kab. Kutai Kartanegara	Bibit Ikan	30,000	ekor	Musrenbang
25		DESA TELUK DALAM, Kab. Kutai Kartanegara	Pakan Ikan	5,000	Kg	Musrenbang
26		Desa Puan Cepak RT.001, RT.002, RT.003, RT.004, RT.005, Kab. Kutai Kartanegara	Bibit Ikan	150,000	Kg	Musrenbang
27		Desa Sanggulan Kecamatan Sebulu, Kab. Kutai Kartanegara	Kolam Terpal	10	Unit	Musrenbang
28		Jl. AM. Sangaji RT.07 Kelurahan Baru Kec Tenggara Kab. Kutai Kartanegara	KJA Bibit Ikan Pakan	10 20,000 3,500	Unit ekor Kg	Musrenbang
29		Gapoktan mekar Jaya Rt 04 Kel.wonotirto, Kab. Kutai Kartanegara	Pupuk Urea	50	Kg	Musrenbang
30		Dusun Selendong RT. 006, Kab. Kutai Kartanegara	Pakan Ikan	5,000	Kg	Musrenbang
31		Dusun Selendong RT. 006, Kab. Kutai Kartanegara	Bibit Ikan	25,000	Kg	Musrenbang
32		Desa Teratak, Kab. Kutai Kartanegara	Kolam Terpal Bibit Ikan Pakan	10 20,000 3,500	Unit ekor Kg	Musrenbang
33		Dusun	Kolam		Unit	Musrenbang

		Sidomulyo, Kab. Kutai Kartanegara	Terpal	10		
			Bibit IKan	20,000	ekor	
			Pakan	3,500	Kg	
34		Rt. 03 Desa Loa Raya, Kab. Kutai Kartanegara	KJA	10	Unit	Musrenbang
			Bibit IKan	20,000	ekor	
			Pakan	3,500	Kg	
35		Rantau Hempang RT 03, Kab. Kutai Kartanegara	Kolam Terpal	10	Unit	Musrenbang
			Bibit IKan	20,000	ekor	
			Pakan	3,500	Kg	
36		Kelompok Mina Karya Santan RT.13 Desa Santan Tengah, Kab. Kutai Kartanegara	Bibit Ikan	30,000	ekor	Musrenbang
37		jalan A.Yani RT 006 desa Sebulu Ilir Kecamatan Sebulu , Kab. Kutai Kartanegara	Pakan Ikan	5,000	Kg	Musrenbang
38		jalan A.yani RT 006 Desa Sebulu Ilir Kecamatan Sebulu , Kab. Kutai Kartanegara	Bibit Ikan	30,000	Kg	Musrenbang
39		Kelurahan Muara Jawa Ilir (Koord.1. 525109 LAT 9903596 LONG Koord.2. 525199 LAT 9903607 LONG), Kab. Kutai Kartanegara	Pintu Air Tambak	1	Paket	Musrenbang
40		rt 09 Desa Makarti Kecamatan Marangkayu, Kab. Kutai Kartanegara	Pakan Ikan	5,000	Kg	Musrenbang

41		RT 09 Dusun Mekarsari Desa Makarti, Kab. Kutai Kartanegara	Bibit Ikan	30,000	Kg	Musrenbang
42		Kembang Janggut	Pakan Ikan			Pokok Pikiran DPRD
43	Kelompok Petani Keramba "Bena Mahakam"	Mangkurawang	KJA			Pokok Pikiran DPRD
44	Kelompok Petani Keramba "Bena Mahakam"	Mangkurawang	Pakan Ikan			Pokok Pikiran DPRD
45	Kelompok Petani Keramba "Usaha Tani"	Mangkurawang	KJA			Pokok Pikiran DPRD
46	Kelompok Petani Keramba "Usaha Tani"	RT.18, Kel. Mangkurawang, Kab. Kutai Kartanegara	Pakan Ikan			Pokok Pikiran DPRD
47	Kelompok Petani Keramba "Usaha Tani"	RT.18, Kel. Mangkurawang, Kab. Kutai Kartanegara	Bibit Ikan			Pokok Pikiran DPRD
48	Kelompok Keramba Perumahan RT.19	Mangkurawang	KJA			Pokok Pikiran DPRD
49	Kelompok Keramba Perumahan RT.19	Mangkurawang	Pakan Ikan			Pokok Pikiran DPRD
50	Kelompok Keramba Perumahan RT.19	Mangkurawang	Bibit Ikan			Pokok Pikiran DPRD
51	Kelompok Petani Keramba "Manula Kreatif"	RT.9 Kel. Mangkurawang, Kab. Kutai Kartanegara	KJA			Pokok Pikiran DPRD
52	Kelompok Petani Keramba "Manula Kreatif"	RT.9 Kel. Mangkurawang, Kab. Kutai Kartanegara	Bibit Ikan			Pokok Pikiran DPRD
	Sub Kegiatan Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan					

1		Desa Umaq Tukung, Kab. Kutai Kartanegara	Pelatihan Budidaya Ikan dan Bantuan Saprass	100	Orang	Musrenbang
2		Desa Ritan Baru, Kab. Kutai Kartanegara	Pelatihan Budidaya Ikan dan Bantuan Saprass	100	Orang	Musrenbang
3		Desa Sidomulyo Kec. Tabang, Kab. Kutai Kartanegara	Pelatihan Budidaya Ikan dan Bantuan Saprass	100	Orang	Musrenbang
4		Desa Muara Pedohon, Kab. Kutai Kartanegara	Pelatihan Budidaya Ikan dan Bantuan Saprass	100	Orang	Musrenbang
	PROGRAM PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN					
	Sub Kegiatan Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota					
1	Alat Tangkap Ramah Lingkungan	Sebemban RT. 05, Kab. Kutai Kartanegara	Kawat Pengilar	500	Roll	Muarenbang
2	Alat Tangkap Ramah Lingkungan	Sabintulung Dusun Kolam RT. 003, Kab. Kutai Kartanegara	Kawat Pengilar Rengge	500 500	Roll Piss	Muarenbang
	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN					
	Kegiatan Penyediaan Dan Penyaluran Bahan Baku					

	Industri Pengolahan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota				
	Sub Kegiatan Pemberian Fasilitas Bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				
1		Sebemban, Kab. Kutai Kartanegara	Mixer Sealer Blender Pemngering	5 5 5 5	Unit Unit Unit Unit Musrenbang
2		Sebemban RT. 05, Kab. Kutai Kartanegara	Freezer	5	Unit Musrenbang
3		Kayu Batu Jl. Dr. Nazir RT.03, Kab. Kutai Kartanegara	Freezer	5	Unit Musrenbang
4		Kayu Batu Jl. Dr. Nazir RT.03, Kab. Kutai Kartanegara	Mixer Sealer Blender Pemngering	5 5 5 5	Unit Unit Unit Unit Musrenbang
5	Poklahsar 'Semoga Berkah'	Muaara Muntai Ulu Jl. Jend. A. Yani RT. 011, Kab. Kutai Kartanegara	Mixer Sealer Blender Pemngering	5 5 5 5	Unit Unit Unit Unit Musrenbang

BAB III TUJUAN DAN SASARAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Agenda Pembangunan Nasional merupakan bagian penting untuk diintegrasikan dalam penyusunan Renja Kelautan dan Perikanan. Agenda Pembangunan Nasional tercermin dari Visi Presiden Yaitu : **Terwujudnya Indonesia Maju Yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian, Berlandaskan Gotong Royong.**

Upaya untuk mewujudkan visi ini melalui 9 Misi Pembangunan, dengan 4 Misi menjadi bagian dari pelaksanaan Pembangunan Kelautan dan Perikanan yang selaras dengan Misi Kementerian Kelautan dan Perikanan, yaitu:

1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia
Misi KKP : Peningkatan Daya Saing SDM KP dan Pengembangan Inovasi dan Riset Kelautan dan Perikanan.
2. Struktur Ekonomi Yang Produktif, Mandiri dan Berdaya Saing.
Misi KKP : Peningkatan Kontribusi Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan Terhadap Perekonomian Nasional.
3. Mencapai Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan.
Misi KKP : Peningkatan Kelestarian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan.
4. Pengelolaan Pemerintah Yang Bersif, Efektif dan Terpercaya.
Misi KKP : Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan di KKP.

Visi Misi Presiden yang kemudian diselaraskan dengan Misi Kementerian Kelautan dan Perikanan tersebut disederhanakan dalam arah kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan, yaitu :

1. Memperbaiki Komunikasi Dengan Nelayan, Penyederhanaan Perizinan, Pengembangan Pelabuhan Perikanan, Pengaturan Penangkapan Ikan sampai ZEE dan Laut Lepas, Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan.
2. Mengoptimalkan dan memperkuat sektor Budidaya Dalam Rangka penyediaan lapangan kerja, Sekaligus meningkatkan penyediaan sumber protein hewani untuk konsumsi masyarakat.
3. Membangkitkan industri kelautan dan perikanan melalui pemenuhan bahan baku industri, peningkatan kualitas mutu produk dan nilai tambah serta peningkatan investasi dan ekspor hasil perikanan.

4. Memperbaiki pengelolaan wilayah laut, pesisir, dan pulau pulau kecil, penguatan sumber daya perikanan.
5. Penguatan SDM dan inovasi riset kelautan

Dalam tatanan implementasi, Kebijakan Nasional tersebut tertuang dalam Program Prioritas Nasional (P6) yaitu **Program Revitalisasi Tambak di Kawasan Sentra Produksi Udang dan Bandeng**. Program ini menysasar pertumbuhan ekspor komoditas udang dalam rangka mempertahankan dominasi Indonesia sebagai Negara Pengekspor Komoditi udang utama dunia. Program Prioritas ini diterjemahkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan selaku Eksekutor Program Nasional tersebut ke dalam **Program Srhimp Estate**.

3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kutai Kartanegara.

Mencermati tantangan dan hambatan dalam melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan, serta mengacu pada target kinerja pembangunan kelautan dan perikanan di Kutai Kartanegara yang tertuang dalam RENSTRA Perubahan Kelautan dan Perikanan 2017-2021, maka tujuan dan sasaran Rencana Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kutai Kartanegara adalah sebagai berikut :

Tabel . Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kutai Kartanegara Tahun 2025.

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja sasaran
2	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi sektor perikanan	Meningkatkan Kesejahteraan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Pengolah Hasil Perikanan	Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian	13,5 %
			Indeks Nilai Tukar Nelayan, Pembudidaya Ikan dan	104
			Nilai Produksi Perikanan	10.658 Miliar Rupiah

BAB IV PROGRAM DAN KEGIATAN

4.1 Program dan Kegiatan

Berdasarkan tujuan dan sasaran Rencana Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kutai Kartanegara Tahun Rencana 2025, Rencana Program dan Kegiatan Tahun Rencana 2025 disusun dengan memperhatikan :

- a. Pencapaian Visi dan Misi Bupati Kutai Kartanegara 2021-2026; khususnya pada **Program Kesejahteraan sosial** yaitu Fasilitasi Pengembangan Usaha bagi masyarakat miskin minimal 1.000 Penduduk Pertahun, **Program Pembangunan Pertanian Berbasis Kawasan** dengan target Fasilitasi sarana dan prasarana 25.000 Nelayan & Pembudidaya Perikanan Produktif dalam upaya peningkatan produksi dan akses pemasaran dan **Program Pengentasan Kemiskinan Ekstrim Sektor Perikanan (Nyaman Be'Jukut)**.
- b. Pencapaian tugas pokok dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan yang telah termuat dalam Renstra Kelautan dan Perikanan 2021-2026.
- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, yang diperkuat dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2020
- d. UU Nomor 07 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan dan Pembudidaya Ikan;
- b. Berkorelasi dan bersinergi dengan kebijakan nasional, Khususnya pada Program Prioritas Nasional (P6) yaitu **Program Revitalisasi Tambak di Kawasan Sentra Produksi Udang dan Bandeng**, diterjemahkan ke dalam **Program Srhimp Estate oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan**.
- c. 3 PILAR PEMBANGUNAN KP :
 - Kedaulatan
 - Keberlanjutan
 - Kesejahteraan,
- g. Proses Analisis Hasil Evaluasi
- h. Tematik, Holistik, Integratif dan Spasial (THIS)
Program dan Kegiatan Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun Rencana 2025 direncanakan berjumlah 5 Program, 21 Kegiatan

dan 68 Sub Kegiatan dengan total pagu anggaran yang direncanakan sebesar Rp. 166.680.443.487,-.

Dengan telah diselesaikannya program direktif khususnya program fasilitasi 25,000 nelayan dan pembudidaya ikan aktif hingga tahun 2024 yang sudah mencapai 31,500 orang maka pada tahun anggaran pemberian fasilitas kepada nelayan dan pembudidaya disasdarkan kepada kelompok – kelompok yang belum pernah tersentuh bantuan dan mebandukuing pencapaian target produksi dan pwersiapan menuju IKN untuk Kukar sebagai lumbung pangan.

Program Nyaman_Be'Jukut yang merupakan program pengentasan kemiskinan nelayan dan pembudidaya akan tetap menajdi rencana kerja di tahun 2025 dengan masih tingginya permintaan desa akan kegiatan ini, akan tetapi bahwa terkait dengan kegiatan kemiskinan Dislutkan akan tetap menyesuaikan dengan program RBPK yang dikelola oleh BAPPEDA mengingat Dislutkan bukan OPD Tekhnis yang memiliki alat ukur/ indikator kesejahteraan. Terkait dengan besara target akan menysuaikan dengan ketersediaan anggaran yang ada di tahun 2025.

Rencana Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun Rencana 2025, secara rinci dsampaikan dalam tabel berikut:

Tabel TC.33 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026 Kabupaten kutai Kartanegara.

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF (Rp)
	NON URUSAN (GENERIK)								
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai Sakip Perangkat Daerah		Angka 85.8	19,421,843,487			Angka 86.0	19,253,308,130
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Rencana, Anggaran dan Evaluasi Kinerja.		Dokumen 3	1,050,000,000			Dokumen 5	926,766,085
	PENYELENGGARAAN WALIDATA PENDUKUNG STATISTIK SEKTORAL DAERAH	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	DKP Kutai Kartanegara, Tenggarong.	Dokumen 1	50,000,000	APBD II.	Koordinasi walidata pendukung statistik sektoral daerah	Dokumen 1	50,000,000

| Rancangan Akhir Renja Kelautan dan Perikanan Tahun Rencana .2025

			PELAKSANAAN PENGUMPULAN DATA STATISTIK SEKTORAL DAERAH	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	DKP Kutai Kartanegara, Tenggarong.	1	Data	250,000,000	APBD II.	Pelaksanaan pengumpulan data sektoral daerah, Satu Data (BECIK) - Kecamatan sebagai pusat data (operasional, Honorarium, Peralatan, pendampingan teknis)	1	Data	250,000,000
			PELAKSANAAN FORUM PERANGKAT DAERAH BERDASARKAN BIDANG URUSAN YANG DIAMPU DALAM RANGKA PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	DKP Kutai Kartanegara, Tenggarong.	1	Berita Acara	50,000,000	APBD II.	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah (Renstra dan Renja)	1	Berita Acara	50,000,000
			Penyusunan Dokumen	Jumlah Dokumen	DKP Kutai	3	Dokumen	500,000,000	APBD II.	Penambahan Anggaran	1	Dokumen	300,000,000

| Rancangan Akhir Renja Kelautan dan Perikanan Tahun Rencana .2025

			Perencanaan Perangkat Daerah	Perencanaan Perangkat Daerah	Kartane gara, Tenggar ong.					Untuk Penyusunan Renstra			
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD.	DKP Kutai Kartane gara, Tenggar ong.		Doku - men	-	APBD II.	Penyusunan Dokumen RKA dapat dilaksanakan tanpa Pembiayaan.		Dokume 1 n	35,000,000
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD.	DKP Kutai Kartane gara, Tenggar ong.		Doku - men	-	APBD II.	Penyusunan Dokumen Perubahan RKA dapat dilaksanakan tanpa Pembiayaan.		Dokume 1 n	35,000,000
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	DKP Kutai Kartane gara, Tenggar ong.	3	Lapo ran	50,000,000	APBD II.		1	Laporan	35,000,000

| Rancangan Akhir Renja Kelautan dan Perikanan Tahun Rencana .2025

			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD.	DKP Kutai Kartanegara, Tenggarong.	3	Laporan	25,000,000	APBD II.	Laporan Keuangan Akhir tahun : Laporan catatan atas laporan keuangan (CALK); Laporan Realisasi Anggaran (LRA); Laporan Operasional (LO)	3	Laporan	20,000,000
			Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	DKP Kutai Kartanegara, Tenggarong.	-	Dokumen	-	APBD II.	Dapat disediakan tanpa Pembiayaan, anggaran difokuskan pada sub kegiatan penting lainnya.	10	Dokumen	25,000,000
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan	DKP Kutai Kartanegara, Tenggarong.	18	Laporan	225,000,000	APBD II.		18	Laporan	225,000,000

				Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD.									
			Penyusunan Pelaporan dan analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	DKP Kutai Kartanegara, Tenggarong.	1	Dokumen	25,000,000	APBD II.		1	Dokumen	25,000,000
			Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		2	Dokumen	80,000,000			6	Dokumen	65,000,000
			Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	DKP Kutai Kartanegara, Tenggarong.	1	Dokumen	25,000,000	APBD II.	Penambahan anggaran untuk peningkatan kualitas laporan.	1	Dokumen	10,000,000

| Rancangan Akhir Renja Kelautan dan Perikanan Tahun Rencana .2025

			Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah Pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD.	DKP Kutai Kartanegara, Tenggarong.	1	Laporan	25,000,000			1	Laporan	25,000,000
			Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	DKP Kutai Kartanegara, Tenggarong.	1	Laporan	30,000,000	APBD II.		1	Laporan	10,000,000
			Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	DKP Kutai Kartanegara, Tenggarong.	-	Laporan	-	APBD II.	Dapat dilaksanakan tanpa Pembiayaan , anggaran dapat difokuskan pada sub kegiatan lain.	3	Laporan	20,000,000
			Administrasi Pendapatan Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi		1	Dokumen	10,000,000	APBD II.		1	Dokumen	10,000,000

			Kewenangan Perangkat Daerah	Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah.									
			Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	DKP Kutai Kartanegara, Tenggarong.	1	Dokumen	10,000,000	APBD II.		1	Dokumen	10,000,000
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian.		1	Dokumen	125,000,000		Anggaran 25.000.000 tidak memadai.	2	Dokumen	125,000,000
			Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	DKP Kutai Kartanegara, Tenggarong.	1	Dokumen	25,000,000	APBD II.		1	Dokumen	25,000,000
			Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi	DKP Kutai Kartanegara, Tenggarong.	1	Dokumen	25,000,000	APBD II.		1	Dokumen	25,000,000

Rancangan Akhir Renja Kelautan dan Perikanan Tahun Rencana .2025

				Kepegawaian.										
				Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	DKP Kutai Kartanegara, Tenggarong.	1	Dokumen	25,000,000	APBD II.		1	Dokumen	25,000,000
				Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	DKP Kutai Kartanegara, Tenggarong.	10	Orang	50,000,000	APBD II.		10	Orang	50,000,000
				Administrasi Umum Perangkat Daerah.	Jumlah ASN Kelautan dan Perikanan Yang Mendapatkan Layanan		110	ASN	845,750,000	APBD II.		110	ASN	745,750,000
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	DKP Kutai Kartanegara, Tenggarong.	1	Paket	3,750,000	APBD II.		1	Paket	3,750,000

| Rancangan Akhir Renja Kelautan dan Perikanan Tahun Rencana .2025

				Bangunan Kantor yang Disediakan.								
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	DKP Kutai Kartanegara, Tenggara.	1 Paket	100,000,000	APBD II.		1 Paket	100,000,000
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan.	DKP Kutai Kartanegara, Tenggara.	1 Paket	50,000,000	APBD II.		1 Paket	50,000,000
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	DKP Kutai Kartanegara, Tenggara.	1 Paket	50,000,000	APBD II.		1 Paket	50,000,000
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan.	DKP Kutai Kartanegara, Tenggara.	1 Dokumen	42,000,000			1 Dokumen	42,000,000

| Rancangan Akhir Renja Kelautan dan Perikanan Tahun Rencana .2025

			Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Kunjungan Tamu	DKP Kutai Kartanegara, Tenggarong.	1	Laporan	100,000,000		Penambahan Sub Kegiatan untuk fasilitasi Tamu.	1	Laporan	-
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Di Dalam Daerah dan Di Luar Daerah	30	Laporan	450,000,000	APBD II.		40	Laporan	450,000,000
			Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	DKP Kutai Kartanegara, Tenggarong.	1	Dokumen	50,000,000			6	Dokumen	50,000,000
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Daerah Diadakan		2	Unit	1,020,000,000	APBD II.		-	Unit	-
			Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau	DKP Kutai Kartanegara,	10	Unit	570,000,000	APBD II.	Penggantian Kendaraan Dinas Jabatan Fungsional	-	Unit	-

| Rancangan Akhir Renja Kelautan dan Perikanan Tahun Rencana .2025

				Disediakan	ong.									
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.		3	Laporan	1,485,898,124	APBD II.		5	Laporan	1,485,898,124
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan.	DKP Kutai Kartanegara, Tenggarong.	1	Laporan	250,000,000			1	Laporan	250,000,000
				Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	DKP Kutai Kartanegara, Tenggarong.	1	Laporan	25,000,000	APBD II.		1	Laporan	25,000,000
				Penyediaan Jasa Pelayanan	Jumlah Laporan	DKP Kutai	1	Laporan	1,210,898,124			1	Laporan	1,210,898,124

			Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kartane gara, Tenggara.								
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan.		Persen	90	540,000,000	APBD II.		Persen	90	540,000,000
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	DKP Kutai Kartane gara, Tenggara.	Unit	23	115,000,000	APBD II.		Unit	23	115,000,000
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak, dan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	DKP Kutai Kartane gara, Tenggara.	Unit	21	95,000,000	APBD II.		Unit	19	95,000,000

| Rancangan Akhir Renja Kelautan dan Perikanan Tahun Rencana .2025

			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Produksi Perikanan Tangkap		95,172	Ton	60,898,600,000			115,158	Ton	27,695,000,000
			Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Nelayan Terfasilitasi Sarana Penangkapan Ikan.		2,000	Nelayan	26,398,600,000			2,138	Nelayan	18,677,000,000
			Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/ Kota yang Tersedia.	Kabupaten Kukar.	2	Dokumen	220,000,000	APBD II		2	Dokumen	320,000,000
			Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Kecamatan Samboja dan Kecama	4	Unit	6,000,000,000	APBD II		3	Unit	3,500,000,000

| Rancangan Akhir Renja Kelautan dan Perikanan Tahun Rencana .2025

			Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia	Kec.Sa mboja, Muara Jawa, Anggana, Sangasanga, Muara Badak, Marangkayu. Muara Kaman, Kota Bangun, Muara Wis, Muara Muntai, Kenohan, Kembarang Janggut.	4,397	Unit	20,178,600,000	APBD II	(1) Sub Kegiatan Baru Hasil Pemutakhirabn dari Sub Kegiatan Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap (2) Rencana Strategis OPD : Peningkatan Produksi dan Produktivitas serta Nilai Tambah Sektor Perikanan (3) Pilot Project kapal berbahan fiberglass (4) Pembangunan Pertanian Bernasis Kawasan	594	Unit	14,857,000,000
			Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah KUB Naik Kelas		20	KUB	32,800,000,000	-		8	KUB	8,668,000,000

				Jumlah Nelayan Miskin dan Rentan Miskin Terfasilitasi Sarana Penangkapan Ikan	500	Orang		APBD II		500	Orang	
			Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya	500	Orang	31,500,000,000	APBD II	(1) Pemenuhan Target Pengentasan Kemiskinan Pelaku usaha Perikanan Tangkap (Nelayan). (2) Pelatihan Nelayan	500	Orang	8,310,000,000

| Rancangan Akhir Renja Kelautan dan Perikanan Tahun Rencana .2025

				Muara Muntai.										
				Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya.	Kec. Samboja, Muara Jawa, Sangasanga, Anggana, Muara Badak, Marangkayu, Muara Kaman, Kota Bangun, Kenohan, Muara Wis, Muara Muntai.	50	Kelompok	300,000,000	APBD II		86	Kelompok	258,000,000

Rancangan Akhir Renja Kelautan dan Perikanan Tahun Rencana .2025

			Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Desa Kota Bangun Ilir, Kec. Kota Bangun, Desa Muara Badak Ilir, Kec. Muara Badak, Desa Kutai Lama, Kec. Anggana, Kelurahan Kuala Samboja, Kec. Samboja.	3	Layanan	500,000,000	APBD II	Untuk peningkatan Kualitas Layanan dalam mendukung optimalisasi operasional TPI.	6	Layanan	50,000,000
			Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai	Jumlah Tanda Daftar Kapal Perikanan		2,000	Tanda Daftar	1,050,000,000			1,000	Tanda Daftar Kapal Perikan	250,000,000

			dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	diterbitkan		Kapa 1 Peri kana n				an	
			Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran Sampai Dengan 10 GT	Jumlah Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Perizinan Berusaha Perikanan Tangkap yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota.	Kutai Kartanegara.	Dokumen 2	50,000,000	APBD II	Penyediaan Dokumen SOP Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan.	Dok -	-
			Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran Sampai Dengan 10 GT	Jumlah Rekomendasi Tanda Daftar Kapal Perikanan	Kec. Samboja, Muara Jawa, Sangasanga, Anggan	2,000 Reko mendasi	1,000,000,000	APBD II	Dalam Rangka pemenuhan persyaratan untuk Ketersediaan SPBN	1,000 Rekome ndasi	250,000,000

				a, Muara Badak, Marang kayu.							
			Pendaftaran Kapal Perikanan Berukuran Sampai Dengan 10 GT yang Beroperasi di Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kapal Perikanan Berukuran sampai 10 GT Terdaftar	Kapa - 1	150,000,000	APBD II		Kapal -	50,000,000	
			Penetapan Persyaratan dan Prosedur Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran Sampai Dengan 10 GT	Jumlah Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Buku Kapal Perikanan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota.	Doku 1 men	50,000,000	APBD II		Dok -	-	

Rancangan Akhir Renja Kelautan dan Perikanan Tahun Rencana .2025

			Pelayanan Penerbitan Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran Sampai Dengan 10 GT						Sub Kegiatan Mengalami Pemutakhiran berganti nama				
			Penerbitan rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP)	Jumlah Rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP) yang Diterbitkan	Muara Kaman, Kota Bangun , Kenoha n, Muara Wis, Muara Muntai.	5,00 0	Reko men dasi	100,000,000		Sub Kegiatan Baru Hasil Pemutakhirabn dari Sub Kegiatan Pelayanan Penerbitan Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran Sampai Dengan 10 GT	1,000	Rekome ndasi	50,000,000
			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Produksi Perikanan Budidaya		185 ,60 8	Ton	64,060,000,000	APBD II		232,8 27	Ton	29,726,000,000
			Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah POKDAKAN Bermitra		50	pokd akan	4,705,000,000	-		20	pokdak an	2,151,000,000
				Jumlah POKDAKAN Naik Kelas		20	pokd akan		APBD II		5	pokdak an	

| Rancangan Akhir Renja Kelautan dan Perikanan Tahun Rencana .2025

				Pengembangan Kapasitas Pembudidaya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas.	Wilayah Kutai Kartanegara	15	Kelompok	455,000,000	APBD II		15	Kelompok	455,000,000
				Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan .	Kecamatan Samboja, Muara Jawa, Sangasanga, Anggana, Muara Badak, Marangkayu, Loajan, Loakulu, Tenggara Seberang, Tenggara	50	Kelompok	250,000,000			48	Kelompok	146,000,000

Rancangan Akhir Renja Kelautan dan Perikanan Tahun Rencana .2025

				ong, Sebulu, Muara Kaman, Kota Bangun , Kenoha n, Muara Wis, Muara Muntai, Kemba ng Janggu t, Tabang.										
				Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Jumlah Kelompok Usaha yang terfasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usahanya	Kecama tan Samboj a, Muara Jawa, Sanga- Sanga, Anggan a, Muara Badak, Marang	100	Kelo mpo k	1,000,000,000	APBD II	Untuk memfasilitasi Rembuk Pembudidaya Ikan (Pertemuan Penyuluh Swadaya, Pembudidaya Ikan, Pengusaha dan Lembaga Pembiayaan,	100	Kelompo k	200,000,000

				Muntai, Kembang Janggut, Tabang.								
			Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Jumlah Tanda Daftar Pembudidaya Ikan Diterbitkan		TDPI 1,000	200,000,000	APBD II		TDPI 1,000	200,000,000	
			Penetapan persyaratan dan prosedur penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudidayaan Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Jumlah Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Perizinan Berusaha Skala Mikro dan Kecil bagi Pembudidayaan Ikan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/K	Kecamatan Tenggaraong.		-	APBD II		-	Rekomendasi	-

				Sebulu, Muara Kaman, Kota Bangun , Kenoha n, Muara Wis, Muara Muntai, Kemba ng Janggu t, Tabang.									
			Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Jumlah Pembudidaya Ikan Terfasilitasi Sarana dan Prasarana Budidaya Ikan.		Pem 2,0 budi 78 daya	59,155,000,000	APBD II		Pembud 1,728 idaya		27,375,000,000	
			Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Pembudidaya an Ikan dalam 1	Di Wilayah Kutai Kartane gara dan	1 Doku men	150,000,000	APBD II	Peningkatan Kualitas Data Statistik Budidaya.	1 Dok.		100,000,000	

Rancangan Akhir Renja Kelautan dan Perikanan Tahun Rencana .2025

				Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	samboja, Muara Jawa, Sanga-Sanga, Anggana, Muara Badak, Marangkayu, Loa Janan, Loa Kulu, Tenggara Seberang, Tenggara, Sebulu, Muara Kaman, Kota Bangun, Kenohan, Muara	981,330	Unit	25,305,000,000	APBD II	Peningkatan Produksi dalam rangka menyambut IKN dan Pengembangan Budidaya Kerang Dara dan Vanamae	8,000	Unit	21,575,000,000
--	--	--	--	--	---	--	---------	------	----------------	---------	---	-------	------	----------------

| Rancangan Akhir Renja Kelautan dan Perikanan Tahun Rencana .2025

			dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota										
			Pengawasan usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota	Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota	Kutai Kartanegara.	100	Pelaku Usaha	11,900,000,000	APBD II	Sub Kegiatan Baru Hasil Pemutakhirabn dari Sub Kegiatan Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	100	Pelaku Usaha	1,000,000,000
			Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan							Sub Keg mengalami Pemutakhiran berganti nama			

Rancangan Akhir Renja Kelautan dan Perikanan Tahun Rencana .2025

			Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan dalam Kabupaten/Kota										
			Pengawasan usaha pembudidayaan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota	Jumlah pelaku usaha pembudidayaan ikan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan kabupaten/kota	Loa Kulu dan Tenggara	10	Pelaku Usaha	100,000,000		Sub Kegiatan Baru Hasil Pemutakhiran dari Sub Kegiatan Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	10	Pelaku Usaha	100,000,000
			PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Produksi Pengolahan Hasil Perikanan		25,095	Ton	10,300,000,000			27,668	Ton	5,900,000,000

			Standar Mutu	Anggana, Muara Badak, Kota Bangun, Muara Wis, Muara Muntai .								
			Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan Atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil	Kec.Sa mboja, Muara Jawa, Anggana, Sanga-Sanga, Muara Badak, Marangkayu, Tenggara, Kota Bangun, Muara Kaman, Muara Wis,						Sub Keg mengalami Pemutakhiran berganti nama	

				Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko.	Muara Muntai, Kenohan.									
				Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang mendapatkan pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	Kec.Samboja, Muara Jawa, Anggana, Sangasanga, Muara Badak, Marangkayu, Tenggarong, Kota Bangun, Muara Kaman, Muara Wis, Muara Muntai, Kenohan.	15	Unit Usaha	500,000,000	APBD II	Sub Keg Hasil Pemutakhiran dari Sub Keg Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan Atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	15	Unit Usaha	500,000,000

			Penyediaan Dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah POKLAHSAR Difasilitasi Sarana Pengolahan dan Pemasaran.		50	POK LAH SAR	9,250,000,000			25	POKLA HSAR	5,500,000,000
			Peningkatan Ketersediaan Ikan Untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota.	Kec. Tenggarong, Samboja, Muara Jawa, Anggana, Muara Badak, Kota Bangun, Muara Wis, Muara Muntai.	50	Ton.	4,000,000,000			50	Ton	500,000,000
			Pemberian Fasilitas Bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1	Kec. Tenggarong, Samboja, Muara Jawa,	50	Pelaku Usaha.	5,250,000,000			50	Pelaku Usaha	5,000,000,000

| *Rancangan Akhir Renja Kelautan dan Perikanan Tahun Rencana .2025*

			Kabupaten/Kota	(Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi.	Anggana, Muara Badak, Kota Bangun, Muara Wis, Muara Muntai.								
			J U M L A H					166,680,443,487					83,674,308,130

RKPD focus pada pencapaian target kinerja Renstra yang periode pelaksanaannya berkurang sebagai akibat dari kebijakan Nasional yaitu pemilihan secara serentak sehingga input anggaran sangat dibutuhkan dalam pencapaian target. Input anggaran juga berdampak pada target yang juga harus ditarik mundur ke tahun anggaran dibelakang perencanaan renstra. Fokus juga diarahkan kepada isu - isu dan rencana - rencana strategis daerah seperti kesiapan dalam menjadi lumbung pangan menyambut Kaltim sebagai IKN maka peningkatan produksi juga perlu dipersiapkan dengan menambah jumlah unit sarana pembudidayaan ikan dan penangkapan ikan, menggenjot produksi udang windu dan rumput laut sebagai komoditas ekspor juga perlu ditingkatkan.

Dengan pencapaian target – terget program direktif tahun 2024 maka pada tahun 2025 fokus kepada pemenuhan target renstra seperti penyediaan prasarana usaha perikanan tangkap dan pembudidayaan ikan, pengentasan kemiskinan nelayan dan pembudidaya berbasis data DTKS/ RBPK, Optimalisasi UPI, Patroli kelestarian ikan dan Sosialisasi ilegal fishing, fasilitasi sarana nelayan dan pembudidaya ikan dalam mendukung kukar sebagai lumbung pangan kaltim.

Dinas Kelautan dan Perikanan menyadari bahwa sinergi perlu dibangun untuk mendukung perbaikan yang berkelanjutan dengan memperkuat implementasi RENSTRA sehingga pelaksanaan renstra dapat berjalan dinamis dengan menyesuaikan dengan situasi dan kondisi terkini, maka reviu terhadap renstra perlu dilaksanakan akan tetapi mengingat waktu yang sudah tidak memungkinkan untuk melaksanakan reviu maka penjelasan akan dituangkan kedalam evaluasi renstra. Renja akan menjadi rancu jika renstra sudah tidak dinamis oleh karena itu pada kesempatan ini disampaikan bahwa perubahann – perubahan yang terjadi didalam sub kegiatan sifatnya tidak berdampak secara langsung terhadap pencapaian target – target indikator kinerja utama Dislutkan, perubahan terjadi pada sub kegiatan skertariat.

BAB V PENUTUP

Rencana Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Rencana 2025 merupakan periode keempat dalam pelaksanaan rencana strategis periode 2021-2026. Program dan kegiatan yang direncanakan merupakan prioritas dalam rangka mencapai visi dan misi Kepala Daerah terpilih seperti tercantum dalam draft RPJMD 2021-2026 dan merupakan kewenangan kelautan dan perikanan Kabupaten Kutai Kartanegara.

Dalam rangka mencapai target – target prioritas sampai dengan tahun 2026 sebagai bagian dari percepatan akibat dari pemilihan kepala daerah serentak maka perubahan dan pergeseran anggaran penting untuk dilaksanakan untuk menyelesaikan target – target RENSTRA, ada beberapa target penting yang harus segera diselesaikan diantaranya pengentasan kemiskinan dalam data RBPK, pembangunan pertanian berbasis kawasan yang salah satunya memuat program fasilitasi 25,000 nelayan, pemberian fasilitas bagi nelayan dan pembudidaya sebagai bagian dari dukungan terhadap rencana kukar untuk menjadi lumbung pangan Kaltim.

Pengentasan kemiskinan pada Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil dan Pengembangan Kapasitas Pembudidaya Ikan Kecil akan tetap menjadi target pelaksanaan hingga berakhirnya RENSTRA karena masih banyaknya nelayan miskin didalam DTKS, bahwa pelaksanaan kegiatan ini memberikan dampak ganda bagi pencapaian target yaitu sebagai lanjutan fasilitasi 25,000 nelayan dan pengentasan kemiskinan. Selain itu juga terdapat kegiatan – kegiatan pendukung 25,000 nelayan dan pembudidaya ikan aktif seperti penggantian alat tangkap ramah lingkungan, fasilitasi UPI dalam pengoptimalisasiannya seperti bimtek, sertifikasi dan bedah UPI.

Rencana Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun Rencana 2025 ini merupakan pedoman/acuan bagi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kutai Kartanegara dalam menjalankan tugas dan fungsi serta cerminan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun Rencana 2025 dalam mewujudkan visi dan Misi Kepala Daerah terpilih. Keberhasilan pelaksanaan Renja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kutai Kartanegara tahun rencana 2025 akan sangat dipengaruhi oleh peran dan tanggungjawab seluruh komponen organisasi pada Dinas Kelautan dan Perikanan, serta *stakeholder* yang terkait.

Dikeluarkan di : Tenggarong
Pada Tanggal : 26 Agustus 2024



	Ditandatangani Secara Elektronik Oleh : KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN MUSLIK, S.Pi., M.Si Pembina Tingkat. I (IV/b)	
---	--	---